

UNDUH MAJALAH ARSIP DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh *file* "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format (PDF)* dan dapat dibaca menggunakan *software Adobe Acrobat*

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia

EDISI 68/JANUARI-APRIL/2016

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

PENGUATAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT



ANRI-MAJALAH ARSIP

PENGUATAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT

EDISI 68/JANUARI-APRIL 2016



anri

**PUSAT
JASA
KEARSIPAN**

Arsip Nasional Republik Indonesia

*Mitra Terpercaya
dalam Pengelolaan Arsip*



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selain sebagai pembina kearsipan nasional juga ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung kepada pencipta arsip dalam melaksanakan kewajiban mengelola arsipnya. Bantuan teknis tersebut tidak bersifat hibah melainkan melalui pembiayaan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu dibentuklah Pusat Jasa Kearsipan yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi:

- (a) Pembuatan pedoman kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
- (b) Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan;
- (c) Pembenahan arsip;
- (d) Pemeliharaan dan perawatan arsip;
- (e) Penyimpanan arsip.

Informasi Lebih Lanjut
Hubungi Pusat Jasa Kearsipan ANRI:
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta
12560 - Indonesia
Telp : +62 21 780 5851 / +62 21 781 5157 Ext. 403/506
Fax : +62 21 7810280 / +62 21 7805812
Email : pusat.jasa@gmail.com
www.jasakearsipan.anri.go.id



KUNJUNGI...
**GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT**

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



DAFTAR ISI



5 KEARSIPAN DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government akan menghasilkan arsip dalam format elektronik. Dengan demikian, arsip merupakan entitas yang tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua aspek. Arsip-arsip yang dihasilkan dalam pemerintahan berbasis e-government, dapat merupakan arsip yang asalnya adalah hard copy atau arsip tersebut memang sejak awal tercipta dalam bentuk elektronik.

DARI REDAKSI 4

Khazanah / Jajang Nurjaman : 14

MEMANG BUKAN SEKAPUR SIRIH

Varia / Dharwis W.U. Yacob: 16

DIGITAL FORENSIK DALAM PENYELAMATAN INFORMASI ARSIP

Varia / Bayu Tanoyo: 19

AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK: UPAYA JAMINAN RELIABILITAS ARSIP

Profil 21

DIGITALISASI ARSIP PERBANKAN DI LINGKUNGAN BANK INDONESIA



9 Arih Murwati : IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

Sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Profil 24

ONNO W. PURBO : E-GOVERNMENT BISA BERJALAN APABILA PELAKUNYA MEMANG MENCINTAI INFORMASI & ARSIP

Daerah 26

CAPAIAN DAN PRESTASI PARA GUBERNUR DI BUMI GORA, JANGAN SAMPAI HILANG !

Manca Negara / Intan Lidwina 30

KONFERENSI SEAPAVAA KE-19 (ADVOCATE, CONNECT, ENGAGE)

Manca Negara / Parno Nusantara 33

IMPLEMENTASI PRASARANA KEARSIPAN DAN ANTI BENCANA DI NATIONAL ARCHIVES OF KOREA



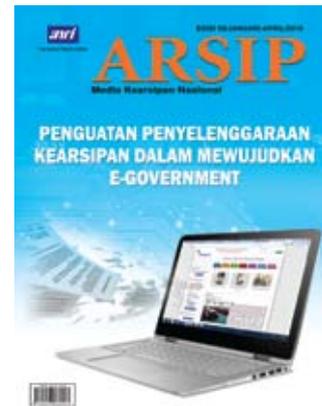
12 Risma Manurung & Suryagung : REKAM JEJAK SURAPATI DALAM ARSIP

Saat kita melintas di wilayah Menteng, Jakarta, mungkin kita akan melewati sebuah taman dengan kolam dan pepohonan dihiasi berbagai patung karya seniman *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Taman yang dibangun sekitar tahun 1920-an itu dulu bernama *Burgemeester Bisschopplein* (diambil dari nama Walikota (*Burgemeester*) Batavia yang pertama G.J. Bisshop (1916-1920). Setelah merdeka, taman tersebut diganti nama menjadi Taman Suropati.

Cerita Kita / Ringga Arif WH 37

MENCARI JEJAK SANG KAKEK

LIPUTAN 40



KETERANGAN COVER

Visualisasi arsip kertas masuk ke dalam laptop dengan tampilan website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Syaifuddin, SE, MM

Pemimpin Redaksi:

Gurandhyka, SIP

Wakil Pemimpin Redaksi:

Dhani Sugiharto, S KOM

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,
M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,
Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si.,
Drs. Langgeng Sulistyio B,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian, S.AP.,
Susanti, S.Sos., M.Hum.,

Editor:

Tiara Kharisma, S.I.Kom.,
Rayi Darmagara, SH.,
R. Suryagung Sudibyo P., S.S, M.Hum.,
Achmad Dedi Faozi, S.Hum.,
Lufi Herawan, S.Kom

Fotografer:

Hanif Aulia Rahman, A.Md.,
Muhamad Dullah, S.Sos

Desain Grafis:

Beny Oktavianto, A.Md
Isanto, A.Md

Sekretariat:

Khoerun Nisa Fadillah, S.IP.,
Yuanita Utami, S.IP.,
Abdul Anas

.....
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id



Rapat Tim Redaksi

Hakekatnya, *e-Government* (e-Govt) merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi (TI), khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi lainnya yang berbasis jaringan, dalam upaya meningkatkan layanan publik secara efektif dan efisien. Sedangkan, penguatan penyelenggaraan kearsipan-setidaknya- dipengaruhi oleh tiga aspek, yakni pemahaman mengenai arsip yang akan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi zamannya, kesiapan para pelaku, baik pembuat maupun pelaksana kebijakan termasuk pemangku kebijakan terhadap berbagai perubahan di bidang kearsipan dan pemanfaatan TIK dalam pengelolaan arsip.

Majalah ARSIP edisi ke-68 yang mengangkat tema "Penguatan Penyelenggaraan Kearsipan dalam Mewujudkan *e-Government*" diharapkan dapat memberikan penguatan mengenai keterkaitan antara arsip, tentunya melalui pemanfaatannya, dengan layanan prima yang selalu menjadi perhatian pemerintah. Untuk memperjelas maksud tersebut kami turunkan sebagai laporan utama beberapa hasil wawancara, baik dengan pejabat publik maupun dengan praktisi yang mumpuni pada bidangnya, di samping beberapa artikel yang terkait.

Sebagaimana biasanya, pada edisi kali ini juga dilengkapi dengan berbagai artikel tetap yang selalu mengisi setiap edisi di luar edisi khusus, seperti Khazanah, Daerah, dan Mancanegara. Semoga sajian informasi melalui majalah kami selalu dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya. Selamat menikmati sajian kami.

Redaksi



KEARSIPAN DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Pemerintahan elektronik atau yang biasa dikenal dengan *e-government* menjadi satu tujuan yang harus diterapkan oleh semua elemen pemerintah baik di dunia internasional termasuk di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan *e-government* di Indonesia diantaranya adalah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penggunaan elektronik dalam sistem pemerintahan dilakukan dengan berbagai maksud diantaranya adalah pemanfaatan

teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan pemerintah sebagai pelayan publik dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik sebagaimana yang diharapkan selain transparansi dalam penyelenggaraan program-program pemerintah. Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah juga dituntut untuk dapat menyajikan informasi secara cepat dan tepat dalam berbagai bidang, khususnya terkait dengan kepentingan masyarakat dan dunia bisnis seperti : pengurusan KTP, paspor, ijin usaha, pelayanan klaim dan lain sebagainya.

E-government merupakan

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik disesuaikan dengan perubahan organisasi dan perkembangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan proses demokrasi serta memperkuat dukungan terhadap kebijakan publik. Dua diantara sembilan agenda prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi – JK, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dimana dua agenda tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui *e-government*. Setidaknya terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam *e-government* yaitu : meningkatkan proses pemerintahan (*e-administration*), menghubungkan

dengan masyarakat (*e-citizens* dan *e-services*) dan membangun interaksi dengan pihak lain (*e-society*). Pada akhir tahun 2015, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dibutuhkan reformasi sistem dan pola kerja dengan menerapkan e-government dalam berbagai hal mulai dari *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalog* sampai *cash flow management system*. Dalam hal ini, penyelenggaraan e-government meliputi hubungan pemerintah dengan publik (*government to customer*), pemerintah dengan pelaku bisnis (*government to business*) dan pemerintah dengan pemerintah (*government to government*). Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menyediakan berbagai informasi aktual terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri/ kepala instansi masing-masing, penyelenggaraan organisasi pemerintahan serta informasi tentang produk yang dihasilkan oleh setiap instansi pemerintah sebagai wujud kerja nyata dari sebuah instansi.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government akan menghasilkan arsip dalam format elektronik. Dengan demikian, arsip merupakan entitas yang tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua aspek. Arsip-arsip yang dihasilkan dalam pemerintahan berbasis *e-government*, dapat merupakan arsip yang asalnya adalah hard copy atau arsip tersebut memang sejak awal tercipta dalam bentuk elektronik. Sehingga dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus berperan aktif dalam memastikan arsip elektronik yang

“
kalau budaya kita tidak terbiasa mengarsipkan yang namanya dokumen, juga menjadi mubazir dan negara dianggap modern, dianggap mempunyai akuntabilitas pada anak cucu masa depan itu jika mampu untuk mengarsipkan dokumennya dengan baik
”

otentik dan reliabel agar tercipta dan terpelihara di semua instansi pemerintah, baik tingkat kementerian, non kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

ANRI sebagai salah satu elemen Pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam sistem guna mewujudkan penyelenggaraan e-government. Sistem aplikasi di ANRI mulai dikembangkan sejak tahun 2003 yaitu pada masa kepemimpinan alm. Drs. Oman Syahrani, M.Si. Pada saat itu dikembangkan Program Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIPATI) merupakan aplikasi pengelolaan arsip dinamis secara elektronik. Perubahan dan perbaikan terus dilakukan dalam bidang kearsipan mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini ANRI

memiliki beberapa aplikasi sebagai salah satu bentuk implementasi dari penerapan e-government di tubuh ANRI dan guna mendukung serta memperkuat penyelenggaraan e-government di instansi pemerintah lainnya, BUMN dan PTN.

Penguatan penyelenggaraan kearsipan dalam mewujudkan e-government oleh ANRI diimplementasikan dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). SIKN merupakan sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dengan menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). SIKN menghimpun data dan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional, dalam hal ini ANRI membangun dua aplikasi yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) atau *e-records* dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)

atau *e-archives*. SIKD merupakan aplikasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip, artinya aplikasi ini diharapkan digunakan oleh semua instansi pemerintah dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. SIKS merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan arsip statis bagi lembaga kearsipan. Tujuan dari pembangunan SIKN adalah untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI. Dalam melaksanakan fungsi SIKN, ANRI membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN merupakan satu sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI berupa website yang dikembangkan dengan mengkoneksikan seluruh simpul simpul yang ada baik pusat maupun di daerah. Pada tahun 2015 sudah terdapat 34 simpul jaringan yang tergabung dalam JIKN.

Dalam sebuah wawancara dengan Kepala ANRI yang dilantik pada 2013, Mustari Irawan mengatakan bahwa “SIKN dan JIKN dimulai pada tahun 2005, ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis. Pada awalnya ini hanya berfokus pada arsip yang statis kemudian kami mencoba untuk memperluas sehingga mencakup juga arsip dinamis. Aplikasi JIKN ini kemudian dimulai dengan pembuatan prototype pada tahun 2011 dan tahun 2012. Dalam hal ini Arsip Nasional bekerja sama dengan PT.



Kepala ANRI, Mustari Irawan (kanan) dan Staf Ahli Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika, Henri Subianto (tengah) saat talkshow membahas E-Government dan Penyelenggaraan Kearsipan

TELKOM, kemudian mencoba untuk mengembangkan lebih jauh untuk mendukung program dari pemerintah yang disebut dengan *e-government* dan *open government* dengan menggunakan pendekatan *cloud computing*, sebagai infrastruktur dari penyelenggaraannya”. Penyediaan website JIKN yang merupakan situs yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kearsipan yang bersifat terbuka dari khasanah arsip dinamis yang dikelola oleh instansi pencipta arsip serta arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan pusat dan daerah.

Menurut Staf Ahli Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Henri Subianto, sebenarnya Undang Undang mengamanatkan pemerintah untuk membangun *e-government* untuk memudahkan masyarakat dilayani dengan pemerintahan itu sekaligus akses masyarakat kepada pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban

akuntabilitasnya dengan teknologi komunikasi itu yang disebut *e-government*. Sehingga semua menjadi semakin mudah, efisien dan efektif karena teknologi komunikasi sekarang adalah sebuah media bisa digunakan untuk semuanya untuk kepentingan berbagai hal pemerintahan dan untuk mengakses informasi publik. Dalam sebuah wawancara Henri Subianto mengatakan “Sebenarnya yang paling penting adalah bahwa pemerintah sekarang menggalakkan apa yang disebut dengan budaya dokumentasi karena walaupun ada Undang-Undang kalau budaya kita tidak terbiasa untuk mengarsipkan yang namanya dokumen, juga menjadi mubazir dan negara dianggap modern, dianggap mempunyai akuntabilitas pada anak cucu masa depan itu jika mampu untuk mengarsipkan dokumennya dengan baik. Jika anda mau keliling dunia ke negara-negara modern atau negara maju itu pasti arsipnya bagus-bagus tetapi jika mengaku negaranya

LAPORAN UTAMA

modern arsipnya masih buruk itu masih slogannya saja, karena budayanya yang penting dan pemerintah, termasuk Arsip Nasional, Kominfo itu mendorong yang namanya budaya dokumentasi atau pengarsipan”.

Melihat program-program yang dimiliki ANRI, dapat diketahui bahwa dalam bidang kearsipan ANRI bekerjasama dengan instansi lain telah melakukan beberapa hal guna mendukung penyelenggaraan e-government. SIKD dan SIKS akan lebih dirasakan manfaatnya oleh Instansi Pemerintah, BUMN dan PTN; sedangkan JIKN akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas karena dengan JIKN masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kearsipan (dinamis dan statis) secara lengkap, tepat, mudah dan murah dimanapun berada. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk JIKN dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengakses jauh lebih mudah, bukan hanya bagi mereka yang berada didalam negeri namun juga yang berada diluar negeri. Hal ini dapat terwujud apabila pada awalnya melakukan dokumentasi dengan baik. Mustari Irawan mengatakan “Kami sudah memiliki beberapa instansi yang sudah masuk yang menjadi simpul, sekitar 34 lembaga dan ada sekitar 5180 data dan informasi yang bisa diakses dengan mudah sekali karena kami memiliki website, baik itu website SKN maupun JIKN. Setiap masyarakat bisa melihatnya jika kementerian dan lembaga sudah memasukkan arsip mereka. Prosesnya adalah mana yang bisa masuk ke dalam jaringan tersebut, proses itu harus dilakukan dengan benar”.



Para peserta temu teknis penyusunan instrumen Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SKID) sedang menyimak pemaparan aplikasi SIKD

SIKN dan JIKN merupakan salah satu strategi untuk mendukung e-government. Program tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. SIKN dan JIKN juga sudah masuk kedalam buku agenda pertama dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan menjadi prioritas pemerintah. Dalam hal ini Mustari mengatakan “Program tersebut harus kita dukung bersama sama, karena jika hanya sendiri saya kira agak sulit, oleh karena itu kita kerja sama dengan KOMINFO, LIPI, dan dengan beberapa kementerian terkait. Hal ini harus dilakukan dalam rangka membangun suatu pemerintahan yang basic nya adalah elektronik itu akan jauh lebih memudahkan jauh lebih akurat dan jauh lebih tepat.”

Penguatan kearsipan dalam mendukung penyelenggaraan e-government juga dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Beberapa instansi pemerintah telah membangun sistem kearsipan guna mempermudah jalannya organisasi mereka. Bahkan

beberapa instansi pemerintah telah mengembangkan SIKD sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Upaya penguatan kearsipan guna mendukung e government juga terus menerus dilakukan oleh ANRI seperti JRA *Online* yang nantinya diharapkan dapat melayani kebutuhan instansi pemerintah, BUMN dan PTN akan jadwal retensi arsip secara lebih cepat. Selain JRA *Online*, ANRI juga akan menerapkan Sertifikasi *Online* yang diharapkan dapat mempermudah seseorang khususnya arsiparis dalam memperoleh sertifikasi dalam bidang kearsipan. Beberapa aplikasi kearsipan yang ada saat ini merupakan salah satu bentuk implementasi program nawacita bapak Jokowi. Dengan aplikasi yang ada, masyarakat dapat mengakses informasi kearsipan yang bersifat terbuka dimanapun mereka berada. (SS).



Arih Murwati:

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

Sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penggunaan aplikasi SIKN, ANRI membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Melalui website JIKN, instansi pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi negeri sebagai simpul jaringan akan terhubung, sehingga informasi kearsipannya dapat diakses oleh masyarakat secara mudah di manapun berada. Selain itu SIKN dan JIKN menjadi payung implementasi *e-records* (arsip dinamis) dan *e-archives* (arsip statis) yang selama ini telah dikembangkan oleh ANRI sebagai model, serta sistem informasi kearsipan lainnya yang telah dikembangkan sendiri oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Amanat Undang-Undang tentang Kearsipan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa Pengelolaan SIKN dan JIKN menjadi salah satu Program Prioritas Nasional dalam Nawa Cita Tahun 2015-2019.

Pembangunan aplikasi SIKN dan

JIKN telah dilakukan sejak Bulan Juli 2012, setelah penandatanganan kerja sama antara ANRI dan PT Telkom Nomor: K.TEL/HK840/UTA-00/2012 dan Nomor: HK.02/11/2012 tentang Penyelenggaraan *E-Government* dan *Open Government* Indonesia pada tanggal 21 Mei 2012, dan selesai pada Bulan September 2013. Aplikasi SIKN dan *website* JIKN sudah dapat digunakan sejak Bulan Oktober 2013.

Manfaat Penyelenggaraan SIKN dan JIKN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan SIKN dan JIKN antara lain: pertama, kemudahan bagi setiap instansi dalam memberikan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat melalui *website* JIKN sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua, kemudahan setiap instansi dalam menghimpun data dan informasi kearsipan menjadi informasi kearsipan nasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintah dan pembangunan serta sebagai memori kolektif bangsa. Ketiga, kemudahan bagi setiap instansi dalam mengidentifikasi dan memperoleh arsip yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas secara cepat, tepat, mudah dan murah, keempat, fasilitas penyimpanan arsip *online* pada SIKN dapat dimanfaatkan untuk mem-backup semua jenis data elektronik lain milik instansi karena telah dilengkapi

dengan fasilitas *Disaster Recovery Center* (DRC) dan data *in-transit & at-rest encryption* dalam rangka menjaga keamanan data dari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Sekilas tentang aplikasi SIKN

Untuk mendukung pengelolaan arsip dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh, ANRI bertanggungjawab membangun dan mengelola SIKN. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah seluruh data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN. Elemen data pada aplikasi SIKN pada proses registrasi simpul jaringan, pembuatan profil organisasi dan unit organisasi, metadata berkas, metadata arsip dan lain yaitu: (1) Registrasi simpul jaringan, merupakan proses pendaftaran sebagai admin simpul jaringan dengan syarat mengajukan pendaftaran ke pusat jaringan (ANRI) dengan melampirkan kontrak kerja sama penyewaan *storage* dengan PT. Telkom. Apabila kedua hal tersebut sudah terpenuhi maka simpul jaringan berhak mendapatkan dua super admin; (2) Struktur organisasi, merupakan fitur pada aplikasi SIKN untuk membuat struktur organisasi dari simpul jaringan, sebelum membuat struktur organisasi pengguna login sebagai admin simpul jaringan, (3) Unit organisasi, merupakan fitur pada aplikasi SIKN untuk membuat unit organisasi dari simpul jaringan, (4)

Pendaftaran pengguna, merupakan fitur pada aplikasi SIKN untuk membuat pengguna aplikasi SIKN di simpul jaringan, (5) Registrasi berkas (dinamis aktif dan inaktif) merupakan fitur pada aplikasi SIKN pada level pengguna di simpul jaringan untuk membuat berkas arsip dinamis, (6) Registrasi arsip, merupakan fitur pada aplikasi SIKN untuk registrasi arsip dinamis/statis. Untuk mengakses fitur ini pengguna harus login sebagai editor.

Sekilas tentang aplikasi JIKN

JIKN merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan arsip statis. Pembentukan JIKN dilakukan pada: (1) Pusat jaringan yang diselenggarakan oleh ANRI, (2) Simpul jaringan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Dalam rangka melaksanakan tugas kearsipan, unit kearsipan pada lembaga negara menjadi simpul jaringan.

Fungsi JIKN adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, meningkatkan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. Fitur yang dikembangkan dalam JIKN adalah: (1) peraturan, berisi produk peraturan yang berkaitan dengan bidang kearsipan dan produk peraturan yang dikeluarkan oleh ANRI, (2) simpul jaringan, berisi tentang data informasi instansi yang telah menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN, (3) berita yang berisi berita kegiatan berkaitan dengan implementasi SIKN dan JIKN, (4) pameran virtual yang berisi pameran arsip digital secara *online* tentang tema tertentu yang kontennya merupakan kontribusi dari simpul jaringan, (5) galeri arsip yang mana pengunjung dapat melihat khasanah arsip dengan tema tertentu yang telah digitalisasi, (6) fasilitas pemesanan arsip yang mana pengguna terdaftar dapat memesan arsip secara online kepada simpul jaringan pemilik arsip tertentu misalnya untuk mendapatkan kopi digital arsip dalam ukuran dan format tertentu. Bukan suatu hal yang mustahil apabila suatu saat JIKN menjadi seperti *Google*-nya kearsipan Indonesia.

Anggota Simpul Jaringan SIKN dan JIKN

Yang menjadi simpul jaringan SIKN dan JIKN adalah (1) Unit kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan kementerian, Kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, (2) Lembaga kearsipan nasional, daerah provinsi dan kabupaten/kota, maupun perguruan tinggi negeri. Adapun potensi simpul jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Melihat potensi instansi yang dapat menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN tersebut, dibayangkan alangkah indahnya dunia kearsipan kalau semua instansi pusat dan lembaga kearsipan daerah bergabung menjadi anggota aktif simpul jaringan SIKN dan JIKN, karena semakin banyaknya anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN secara aktif akan semakin banyak data dan informasi kearsipan yang dapat disediakan untuk masyarakat, bisa saling berbagi data dan informasi kearsipan antarinstansi yang kesemuanya untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.

Menjadi Anggota Simpul Jaringan SIKN dan JIKN

Untuk dapat menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN, harus ditempuh beberapa tahap pendaftaran yaitu: (1) Registrasi sebagai anggota terdaftar pada *website* JIKN (www.jikn.go.id), (2) *login* sebagai anggota terdaftar pada *website* JIKN dan mendaftarkan instansi sebagai simpul jaringan, (3) Instansi akan menerima tindak lanjut dari PT. Telkom dan membuat kesepakatan kontrak *storage* penyimpanan arsip secara *online*, (4) instansi melengkapi data administrator simpul dan mengunggah dokumen persyaratan, (5) menerima persetujuan dari administrator pusat dan mendapat akun administrator simpul jaringan, (6) instansi *login* pada aplikasi SIKN (www.sikn.jikn.go.id) untuk menyusun struktur organisasi dan pengguna system, (7) menerima persetujuan struktur organisasi dan pengguna dari administrator pusat, sehingga data dan informasi kearsipan sudah dapat diinput ke dalam sistem.

Beberapa hal menyangkut persiapan teknis yang harus dilakukan di simpul jaringan, yaitu: (1) aplikasi SIKN dan JIKN yaitu koneksi internet berkecepatan tinggi (*broadband*) dan menggunakan IP statis (*fixed IP*), (2) infrastruktur perangkat keras dan perangkat lainnya, yaitu paling tidak disediakan 3 perangkat computer yang secara khusus dipergunakan untuk meng-*input* data dan informasi kearsipan dan koneksi internet, validasi data oleh validator dan *personil* yang bertanggungjawab terhadap *control* status keterbukaan/ketertutupan data dan informasi arsip, perangkat pemindai (*scanner*) untuk melakukan digitalisasi atau pembuatan *copy* digital arsip kertas yang akan di-*input* ke dalam aplikasi SIKN, (3) koneksi

Persiapan Teknis Implementasi SIKN dan JIKN oleh Simpul Jaringan

NO	POTENSI SIMPUL JARINGAN	JUMLAH
1	Lembaga tinggi negara	7
2	Lembaga negara eksekutif	34
3	Lembaga Negara Setingkat menteri	5
4	Lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK)	28
5	Lembaga negara rumpun yudikatif	3
6	Lembaga non-struktural (LNS)	78
7	Pemerintahan daerah provinsi	34
8	Pemerintahan daerah kabupaten	403
9	Pemerintahan daerah kota	99
10	Badan usaha milik negara	119
11	Perguruan tinggi negeri	130
	TOTAL	940

internet, karena penyelenggaraan SIKN dan JIKN memanfaatkan teknologi komputasi awan (*cloud computing*) milik PT. Telkom, (4) sumber daya manusia, paling tidak simpul jaringan harus menunjuk 3 orang yang secara khusus ditugaskan untuk *input* data dan informasi kearsipan dengan menggunakan aplikasi SIKN, sebagai validator data dan informasi kearsipan yang di-*input*, dan sebagai petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penentu status keterbukaan/ketertutupan data dan informasi kearsipan yang telah diinput. (5) Ketersediaan daftar arsip yang akan di-*input* ke dalam aplikasi SIKN, (6) anggaran biaya untuk sewa *storage* penyimpanan arsip *online* milik PT. Telkom.

Kegiatan dalam Penyelenggaraan SIKN dan JIKN

Ada pepatah “tak kenal maka tak sayang”. Untuk mendukung penyelenggaraan SIKN dan JIKN maka Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional ANRI secara rutin mengadakan sosialisasi SIKN dan JIKN dengan membuat dan menyebarkan bahan-bahan sosialisasi SIKN dan JIKN seperti: brosur, pamflet, poster, *sticker* dan sebagainya, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program penyelenggaraan SIKN dan JIKN, mengadakan penjajakan dan sosialisasi SIKN dan JIKN dengan mengundang pimpinan seluruh instansi yang bertujuan menjangkau anggota simpul jaringan baru, *workshop* SIKN dan JIKN dalam rangka memberikan pengetahuan teknis implementasi SIKN dan JIKN khususnya terkait dengan penggunaan aplikasi SIKN dan JIKN, bimbingan dan konsultasi yang dilakukan dalam bentuk penerimaan kunjungan ke ANRI maupun kunjungan tim ANRI ke masing-masing simpul jaringan, pendidikan dan pelatihan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan ANRI, penerimaan magang untuk mempelajari aplikasi secara terbimbing dan rapat koordinasi nasional sebagai sarana koordinasi fungsional dan koordinasi temu jaringan serta menyediakan *helpdesk* nasional SIKN dan JIKN yang dapat dihubungi yaitu Administrator Pusat SIKN dan JIKN ANRI, Jl. Ampera Raya nomor 7 Cilandak-12580, telp (021) 7802043, fax (021) 7810282, email admin@jikn.go.id atau website www.jikn.go.id

Kendala implementasi SIKN dan JIKN

Sampai dengan akhir tahun 2015, sebanyak 34 instansi dari lembaga negara pusat, lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan perguruan tinggi telah bergabung sebagai anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN yang mana beberapa simpul jaringan tersebut dijangkau melalui pemberian stimulan bebas biaya sewa *storage* selama 3 bulan dari bulan Oktober s.d Desember 2015 dari ANRI.

kendala yang dihadapi berkaitan dengan kesulitan menjangkau instansi menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN adalah: (1) belum tersosialisasikannya program penyelenggaraan SIKN dan JIKN secara masif ke seluruh instansi baik di pusat maupun di daerah, (2) ketersediaan sumber daya manusia, bahwa banyak instansi yang belum mempunyai arsiparis ataupun tenaga pengelola arsip yang memadai yang dapat ditunjuk sebagai petugas khusus melakukan input data dan informasi kearsipan ke dalam aplikasi SIKN, petugas validator yang melakukan validasi kebenaran dan ketepatan data dan informasi yang diinput ke dalam aplikasi SIKN maupun petugas PPID yang bertanggungjawab terhadap penentuan akses keterbukaan-ketertutupan data dan informasi kearsipan. (3) kondisi pengelolaan arsip yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan berkaitan dengan ketersediaan daftar arsip yang akan diinput ke dalam aplikasi SIKN, (4) ketersediaan koneksi internet yang stabil, (5) ketersediaan infrastruktur pendukung seperti: perangkat komputer dan *scanner*, (6) ketersediaan anggaran untuk sewa *storage*.

Di sisi lain, saat ini banyak aplikasi di bidang pengelolaan kearsipan yang ditawarkan ke instansi-instansi selain aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) yang secara resmi juga merupakan produk dari ANRI, belum lagi aplikasi yang secara mandiri dibangun oleh beberapa instansi, membuat sosialisasi aplikasi SIKN dan JIKN harus dilaksanakan secara intens dan masif ke instansi-instansi.

Rekomendasi untuk Implementasi SIKN dan JIKN

Rekomendasi dari beberapa

instansi untuk keberhasilan implementasi SIKN dan JIKN adalah (1) ANRI mengeluarkan kebijakan bahwa setiap instansi wajib menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (2) Sebagai program prioritas nasional, penyelenggaraan SIKN dan JIKN diusulkan kepada Kementerian Keuangan agar dapat mempunyai kode akun permanen di dalam DIPA nasional yang akan mempermudah instansi untuk mengalokasikan anggaran implementasi SIKN dan JIKN di lingkungan instansi masing-masing, (3) ANRI memberikan anggaran stimulan untuk sewa *storage* kepada seluruh simpul jaringan terutama untuk simpul jaringan di lingkungan lembaga kearsipan daerah di provinsi maupun kabupaten/kota mengingat keterbatasan anggaran di bidang kearsipan di lembaga kearsipan daerah (4) ANRI membangun *Application Programming Interface* (API) yaitu suatu aplikasi yang bisa secara langsung mengintegrasikan data dan informasi kearsipan dari aplikasi yang sudah dimiliki atau digunakan oleh instansi ke dalam aplikasi SIKN dan JIKN.

Kesimpulan

(1) Penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai program prioritas nasional perlu didukung oleh seluruh instansi baik itu di tingkat pusat maupun lembaga kearsipan daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan BUMN, (2) Sejatinnya, dengan bergabung menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN, maka instansi telah mendukung pelaksanaan paling tidak 4 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (3) Keberhasilan implementasi SIKN dan JIKN secara nasional akan sangat mendukung Penyelenggaraan *E-Government*, program *Open Government Indonesia* (OGI) terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan inovasi menuju *good public governance*.

Risma Manurung & Suryagung

REKAM JEJAK SURAPATI DALAM ARSIP

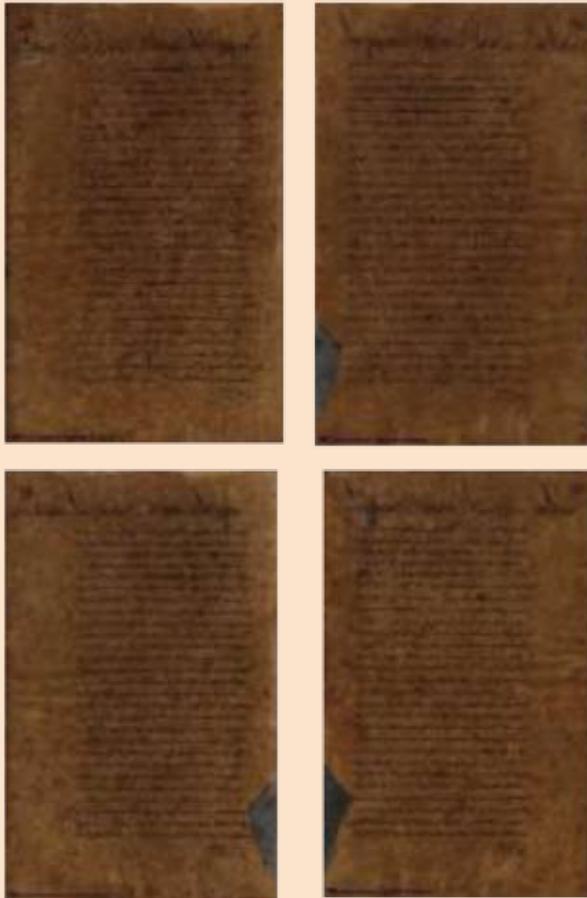
Saat kita melintas di wilayah Menteng, Jakarta, mungkin kita akan melewati sebuah taman dengan kolam dan pepohonan dihiasi berbagai patung karya seniman *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Taman yang dibangun sekitar tahun 1920-an itu dulu bernama *Burgemeester Bisschopplein* (diambil dari nama Walikota (*Burgemeester*) Batavia yang pertama G.J. Bisshop (1916-1920). Setelah merdeka, taman tersebut diganti nama menjadi Taman Suropati.

Suropati adalah tokoh sejarah nusantara yang melegenda. Kisahnya sebagai seorang anak rakyat jelata dan budak *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang menjadi seorang bangsawan dan Tumenggung (Bupati) Pasuruan. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia menetapkan ia sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya melawan kolonialisme VOC di Pulau Jawa, kisahnya pun tercatat dalam *Babad Tanah Jawi*. Tidak hanya itu, *Babad Tanah Jawi*, kisah budak dari Bali ini pun tercatat dalam khazanah yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

SURAPATI DALAM KHAZANAH ANRI

Catatan Harian Kastil Batavia, 20 April 1697 [Fol. 288-291]

Tahun 1686, utusan utama VOC yaitu Kapten François Tack (perwira VOC senior yang ikut berperan dalam penumpasan Trunajaya dan Sultan Ageng Tirtayasa) telah dibunuh di dekat keraton Kartasura disaksikan semua orang terhormat di kerajaan. VOC menganggap pembunuhan yang dilakukan oleh penghianat orang Bali yang dikenal dengan nama Surapati bersama gerombolan pengacau tersebut didukung oleh Kerajaan. Hal ini terlihat dari tidak ditangkapnya Surapati oleh Amangkurat. Padahal Surapati juga pernah membantai orang-orang dan pegawai kompeni di Cikalong. Kejadian ini terjadi pada 28 Januari 1684 di Sungai Cikalong, saat



Catatan Harian Kastil Batavia, 20 April 1697 [Fol. 288-291]

itu prajurit VOC pimpinan Vaandrig Kuffeler yang ditugaskan membawa Pangeran Purbaya dari Kesultanan Banten dihancurkan oleh Surapati.

Gubernur Jenderal serta Dewan Hindia sudah memberi peringatan kepada Susuhunan. Padahal apabila Surapati tetap tinggal di Kartasura Dinigrat, maka VOC dengan mudah menangkapnya. Namun hal itu tidak terjadi, justru utusan VOC, Mr. Francois Tack yang diutus oleh Gubernur Jenderal serta Anggota Dewan Hindia untuk menghadap di depan Susuhunan dengan maksud untuk membicarakan sesuai surat yang ditulis pada tahun 1684. Namun, yang bersangkutan

langsung membicarakan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan Susuhunan yaitu sejumlah kontrak dan janji yang sudah dibuat sebelumnya.

Semestinya hak umum seorang utusan resmi yang sebenarnya tidak boleh dilanggar, tidak dihormati, dan sebagai akibatnya maka pengkhianat serta pembunuhnya seharusnya diadili serta dihukum sesuai tindak kejahatannya, tetapi hal tersebut tidak terjadi. Seperti yang tertera dalam Surat VOC tertanggal 1 April tahun 1692, perhatian Susuhunan diarahkan bahwa Amiran Cassuma yang jahat itu, seperti yang Susuhunan juga memaklumi, sudah bersekongkol

dengan pengkhianat Surapati dan telah melakukan pembunuhan utusan kami, namun sesudah waktu yang cukup lama yang bersangkutan masih tetap berada di Kartasura Diningrat dan bahkan juga hadir di keraton Susuhunan.

Oleh sebab itu, Gubernur Jenderal dan Anggota Dewan Hindia menyimpulkan bahwa Susuhunan telah mengabaikan untuk menghukum kedua penjahat tersebut yaitu Surapati dan Amiran Cassuma sesuai perbuatan buruk mereka. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka jelaslah bahwa pemerintahan Susuhunan atas kawulanya di Jawa telah dirampas oleh para menteri dan para petinggi kerajaan, paling tidak oleh tokoh-tokohnya, maka Gubernur Jenderal dan Anggota Dewan Hindia terpaksa harus memberitahukan kepada Susuhunan bahwa tidak lama lagi, Surapati tersebut bersama kronikroninya yang jahat yang berada di Kartasura Diningrat akan bersama-sama menggulingkan Susuhunan dari tahtanya dan penerusnya yang sah juga akan ditahan.

HR 2519, folios 885-888, berisi Surat dari Susuhunan (Kaisar) Amangkurat II (1677-1704) di Istana Kartasura kepada Pemerintah Agung di Kastil Batavia, 18 Desember 1699

Dalam surat ini, Susuhunan meminta bantuan kepada Batavia karena adanya kemungkinan ancaman pemberontakan dari dalam oleh budak Bali pelarian yang dipimpin oleh Surapati. Surapati kemudian telah membentuk sebuah kerajaan yang independen untuk dirinya sendiri yang berpusat pada Pasuruan, sebuah kota pelabuhan di Jawa Timur. Surapati didukung oleh salah satu penguasa di Bali. Surapati saat ini akan berangkat ke Surabaya untuk merebut kota tersebut. Sekarang mereka masih berada di daerah Paketingan bersama 800 serdadu bersenapan sundut dan 800 serdadu lagi bersenjata lain. Selain itu masih ada sekelompok musuh lain yang telah diperintahkannya untuk merebut Panaraga, Madiun dan Kannagattar. Namun saat ini, Susuhunan sudah menempatkan serdadu dan rakyat bersenjata dari Kartasura di sekeliling kubu-kubu pertahanan mereka di sebelah timur tepi sungai dan di sebelah barat tanah Wolak Walikan.



HR 2519, folios 885-888, berisi Surat dari Susuhunan (Kaisar) Amangkurat II (1677-1704) di Istana Kartasura kepada Pemerintah Agung di Kastil Batavia, 18 Desember 1699

HR 923 14 Mei 1706 fols 319-322

Dalam catatan ini bahwa pada tanggal tersebut diadakan rapat luar biasa. Rapat membahas hal-hal yang berkaitan dengan Jawa, lanjutan dari rapat sebelumnya. Rapat membahas juga dua dokumen dari dewan mengenai ekspedisi mengejar Pangeran Adipati Anom, sang buronan dan Surapati.

Diberitahukan bahwa komandan Cnol melakukan perjalanan ke Kartasura untuk menjelaskan perkara Surapati, pernah menjadi pembantu VOC, dan untuk mendiskusikan tentang pemerintahan atas bantuan kaisar (raja), yang dalam hal ini Adipati Jayadiningrat yang berkuasa.

Sementara pada fols 322, utusan susuhunan di sini, yang mewakili suara pemerintahan VOC, telah mengirim pasukan yang menuju Surabaya untuk memburu Surapati dan Pangeran

Adipati. Untuk ekspedisi di bawah komando Cnol di tanah Pasuruan untuk membantu Susuhunan Pakubuwono menangkap pemberontak Surapati, seperti demikian laporannya: komandan Cnol dan kapitan Van Bergen memimpin pasukan dari sayap kanan dan kiri.

Saat ini, berbagai arsip mengenai Surapati tersebut sudah didigitalisasi melalui Proyek *Digital Archive System* at ANRI atau Sistem Arsip Digital di ANRI (DASA) yaitu sebuah kerja sama internasional berbasis web antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan The Corts Foundation. Berbagai sumber terkait dengan Surapati kini sudah dapat dilihat dalam website www.sejarah-nusantara.anri.go.id. Hanya dengan *search* Sourapattij/ Surapati/Surapaty pada website tersebut maka akan tampil arsip mengenai Surapati dalam bentuk digital.

Jajang Nurjaman

MEMANG BUKAN SEKAPUR SIRIH

Sirih

Orang koelit hitam soeka sekali makan sirih

Apakah kawan daoen sirih itoe?

Berapa matjam daoen sirih itoe?

Berapa matjam maka lengkap?

Lima matjam, ja'ni sirih, pinang, gambir, kapoer dan tembakau.

Pertjakatapan

Kemana engkau, Miah hai?

Hamba hendak kesawah menengok padi.

Singgahlah dahoeloe makan sirih!

Ada engkau bersirih?

Ada, selengkapnja!

Kalau begitoe, naiklah hamba.

Itoelah sebaiknja! Naiklah!

Dua fragmen di atas ditemui dalam sebuah buku pembelajaran bahasa Melayu. Sirih, atau nama latinnya *piper betle*, sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak zaman raja-raja lokal masih berkuasa. Sirih tidak lepas dari kebudayaan melayu yang mencampur daun sirih dengan kapur, pinang, dan gambir

untuk dijadikan semacam kunyahan. Antropologis menyatakan bahwa sirih ditemukan di sebuah Goa di barat laut Thailand pada 5500-7000 SM. Di Indonesia sendiri, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sirih ditemukan di Timor pada 3000 SM. Khasiat daun sirih pun sudah terkenal, antara lain untuk kesehatan. Bahkan, daun sirih juga acap kali digunakan sebagai perantara dalam upacara-upacara adat memanggil roh leluhur. Dalam kitab Kamasutra India, sirih juga disebutkan memiliki daya magis, dan orang yang mengunyah sirih mendapat status terhormat tertentu. Sampai sekarang-pun, masih banyak ditemui masyarakat yang mengunyah sirih di waktu-waktu tertentu. Pieter van Dam dalam sebuah karyanya pernah menuliskan jika sirih menjadi penyebab kematian salah seorang budak yang diangkut dari Sumatera bagian Pesisir Pantai Barat. Budak tersebut ditemukan meninggal ketika akan dijual di Batavia. Penyebab kematiannya disebabkan budak tersebut meminum ramuan yang mengandung terlalu banyak sirih di dalamnya. Karya van Dam yang sebanyak lima jilid ini, juga menceritakan beberapa ramuan pinang yang dicampur dengan sirih dan kapur sudah digunakan masyarakat Hindia Timur untuk membuat minuman

beralkohol. Minuman ini juga dicampur dengan sari pohon arak.

Beda zaman beda kegunaan. Kongsida dagang Hindia Timur, biasa dikenal dengan sebutan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), melihat potensi daun sirih sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Dalam arsip VOC, disebutkan bahwa sirih sering digunakan sebagai hadiah penyambutan kepada tamu yang datang berkunjung. Ini termaktub dalam *Generale missiven van Gouverneurs-generaal en Raden aan Heren XVII der Vereenigde Oostindische Compagnie* edisi pertama yang menyebutkan bahwa *de sirihpruim werd aan bezoekers als welkomstgave aangeboden*, mengunyah sirih dipersembahkan kepada tamu sebagai hadiah penyambutan.

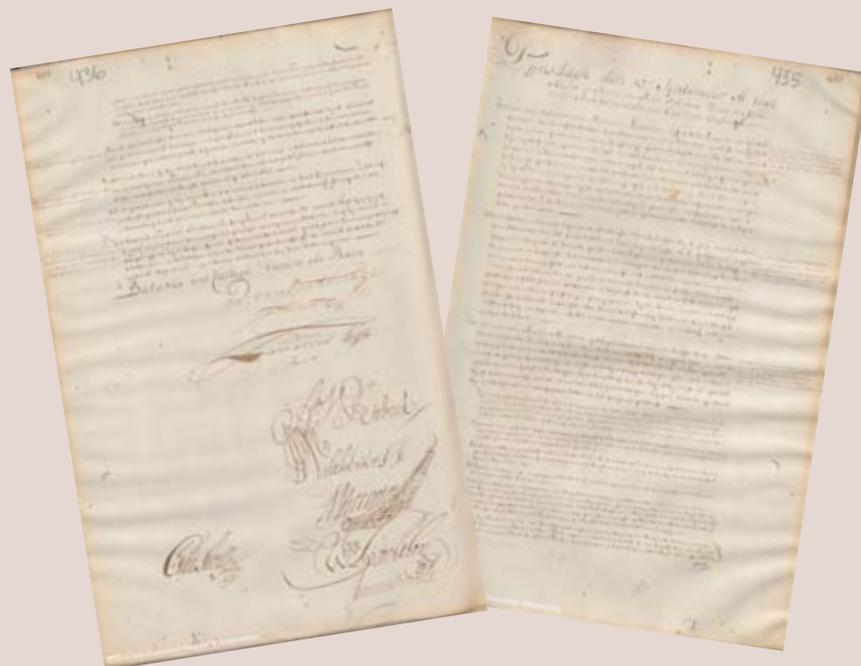
Di dalam website www.sejarah-nusantara.anri.go.id, ditemukan tiga hasil pencarian yang berkaitan dengan arsip VOC mengenai sirih. Dengan menuliskan kata *sirij* pada menu pencarian, maka muncul dua subjek realia yang mengarah ke arsip VOC seri *generale resoluties*. Dua subjek ini adalah *sirij* dan *sirijbladen*. Subjek *sirij* ditemukan dalam arsip *Hoge Regering* (HR) nomor 873 folio 8-9 dan HR nomor 873 folio 44-45. Sedangkan

subjek *sirijbladen* ditemukan dalam arsip HR nomor 863 folio 523-525.

Dalam arsip HR nomor 863, dijelaskan bahwa *sirijbladen* atau daun sirih liar (*wilde sirijbladen* (dalam arsip tertulis *cirij bladen*) dilarang dijual oleh pembuat kebijakan. Lebih jauh lagi, arsip tertanggal 15 April 1648 ini juga menjelaskan bahwa daun sirih yang bagus adalah yang berasal dari kebun yang bagus, bukan daun sirih liar. Bagi yang ketahuan menjual daun sirih liar, akan dikenakan denda. Putusan ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal VOC saat itu, yakni Cornelies van der Lijn dan anggota Raad van Indië lainnya.

“...dat alhier binnen onse steden te copen worden gebracht eenige wilde **cirij** bladen, welcke eenige Javanen ende andere swarten haer niet onsien uijt de wilderener ver op te soecken, ende alhier in plaets van goede thuijn **cirij** te vercoopen waer mede (...) goede thuijn **cirij** seer vercort ende derselver pacht intrecken verminderdt werdt. Soo ist dat om hetselve in tijts voor te comen, goedt gevonden ende geresolveert hebben alle ende een ider te verbieden ende te interdiceeren na desen sodanige bos **Cirij** ofte **cirij** ontfangen alhier te coopen te brengen, op poene, wie na maelen bevonden mocht worden, contrarie dese onse beweeg te hebben gedaen aenstouten buijten formen van proces voor des tijt van ses maenden in de kettingh sael worden (...) niettemien een amende van vijftwintigh realen, de een schest voor den aenbrengen, de andere schest voor de officier de (...) *sulcx ten meesten oubaer sodanigh bevinden te behooren.*”

Arsip yang lain, tercatat di HR nomor 873 folio 8-9, yang menerangkan bahwa daun sirih menjadi komoditas yang wajib dikenakan biaya sewa. Hal ini muncul atas permohonan orang Cina yang meminta kepastian hukum mengenai sirih yang tumbuh di kebunnya. Arsip tertanggal 13 Januari 1661, ini juga memberikan gambaran



Arsip HR (series generale resolutie) nomor 913 halaman 435 dan 436 (tanggal arsip 10 september 1697) tentang sirih dan pinang yang dipersembahkan ke para pembesar pribumi dari VOC.

bahwa sirih dibayarkan biaya sewanya per bulan tiap tanggal 18, dimulai dari bulan ditetapkannya keputusan ini.

“alsoo den Chineesen versocht heben om in pacht te hebben de gerechtigheid van de **sirij**, die ter deser plaetsen gewonnen wordt, namentlijk om te mogen hebben ende genieten van elcke duijsent stokken die in de sijnen thuijnen worden gebruijcken...”

Di arsip HR 873 folio 44-45, lebih jauh lagi dijelaskan mengenai besaran sewa untuk setiap seribu (1000) helai daun sirih. Dijelaskan juga bahwa penanam daun sirih yang merupakan seorang Cina bernama Lim Nim Ko. Harga sewa untuk daun sirih ditetapkan sebesar satu realen 48 *stuivers* per 1000 batang daun sirih yang harus diserahkan ke kompeni.

“sijn ter vergaderinghe kunnen gestaen eenige **sirij** planters deser stede, doler ende uijt den name vande wordere mede planters van de **sirij**,

dat Lim Nim Ko chinees die den 18 januarij besteeden, de voorsch. **Sirij** tot 1000 realen des maents dit lopende jaer van de compagnie gepachtheert, haer van elcke duijsend **sirij** stocken in hare thuijnen staende, een realen van 60 *stuijvers* hadde afgangvordert ende daer eenewaerts gelast, seven dagen om de andere maend een briethen van de betaling der voornaemde pacht bij hem te komen halen of dat hij haer andere in de boeten soude beslaen, daer nochtans voor deser niet meer als een reale van 40 *stuijvers*...”

Dari arsip-arsip VOC ini dapat disimpulkan bahwa sirih sudah menjadi barang dagangan sejak zaman kolonial. Maka tidak heran ketika di pasar-pasar kita menjumpai pedagang sirih lengkap dengan pinang, kapur, dan gambir, karena sirih memang bukan hanya sekapur sirih.

Dharwis W.U. Yacob

DIGITAL FORENSIK

PENYELAMATAN INFORMASI DALAM ARSIP

Ketika zaman terus berjalan, perkembangan sejarah manusia juga semakin berubah. Kini era teknologi telah menjadi bagian dalam perkembangan sejarah manusia. Begitu pula dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan telah mengalami revolusi, mengikuti perkembangan teknologi. Dan itu juga terjadi dalam ilmu kearsipan. Ilmu kearsipan memerlukan ilmu bantu lain untuk mengembangkan ilmunya dalam era teknologi ini. Digital forensik adalah salah satunya.

Digital forensik merupakan sebuah kombinasi ilmu yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan/penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer. Istilah ini relatif baru dalam bidang komputer dan teknologi, tapi telah muncul sejak pertengahan tahun 1980-an. Digital forensik juga merupakan kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum. Digital forensik atau terkadang disebut komputer forensik adalah ilmu yang menganalisis barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk



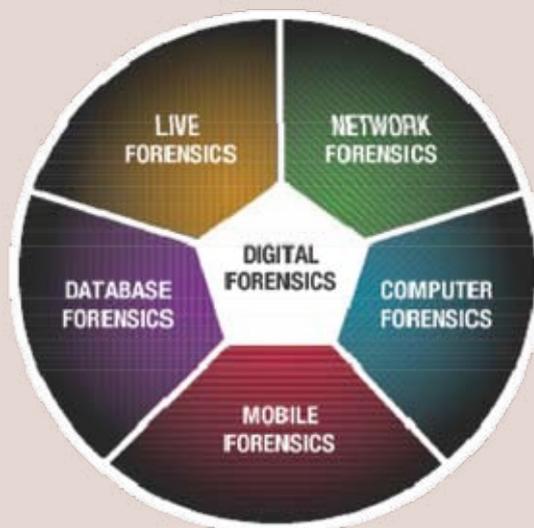
Sarana penyimpanan dalam digital forensik

telepon genggam, notebook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisis. Digital forensik juga diartikan sebagai penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan *software* dan *tool* untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal menurut A. J. Marcella, dan R. S. Greenfiled dalam bukunya yang berjudul *Cyber Forensics: A Field Manual For Collecting, Examining, And Preserving Evidence Of Computer Crimes* yang diterbitkan pada tahun 2002. Digital forensik dapat menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak digital dapat mencakup sistem komputer,

media penyimpanan (seperti *hard disk* atau CD-ROM, dokumen elektronik / misalnya pesan *e-mail* atau gambar JPEG) atau bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaringan. Selain itu, digital forensik merupakan karakteristik bukti yang mempunyai kesesuaian dalam mendukung pembuktian fakta dan mengungkap kejadian berdasarkan bukti statistik yang meyakinkan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa digital forensik adalah penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan bukti/informasi yang secara magnetis tersimpan/disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital.

Digital forensik juga memiliki cabang-cabang ilmu di dalamnya seperti *firewall* forensik, forensik jaringan, database forensik, dan forensik perangkat *mobile*. Prinsip kerja dari digital forensik mirip dengan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengusut bukti tindak kejahatan dengan menelusuri fakta-fakta yang ada. Hal yang membedakan pada digital forensik adalah proses dan kejadiannya terdapat dalam dunia maya atau pada dunia nyata dengan fokus pada aktivitas yang mengarah pada barang bukti digital. Secara garis besar tujuan dari digital forensik yaitu untuk membantu proses pemulihan dan analisa serta mempresentasikan barang bukti digital dengan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Selain itu, digital forensik juga bertujuan untuk mendukung proses identifikasi barang bukti digital dengan jangka waktu yang singkat.

Sejarah digital forensik berdasarkan tulisan Charters dalam bukunya *The Evolution Of Digital Forensics: Civilizing The Cyber Frontier* yang diterbitkan pada tahun 2009 dimulai pada Tahun 1970 dengan terjadinya sebuah kasus pertama yang melibatkan kejahatan komputer yang merupakan jenis penipuan terutama keuangan. Pada tahun 1980, peneliti keuangan dan pengadilan menyadari bahwa terdapat kasus-kasus yang memiliki catatan dan bukti-bukti hanya pada komputer dan pada tahun itu pula, *Asosiasi Certified Fraud Examiners* mulai mencari pelatihan dalam ilmu digital forensik dan membuat kelas pelatihan bernama "SEARCH" dan kelas reguler mulai diajarkan kepada agen FBI (*Federal Bureau of Investigation*) di California dan Georgia, Amerika Serikat. Perkembangan ilmu digital forensik terjadi pada tahun 1984, FBI



cabang-cabang ilmu dari digital forensik

membuat program pelatihan yang disebut *Media Magnetic Program* kemudian menjadi Analisis Komputer dan Respons Tim atau disebut dengan CART. Perkembangan selanjutnya adalah pada Tahun 1987, Akses Data Perusahaan Siber Forensik terbentuk dilanjutkan pada Tahun 1988, terbentuk organisasi IACIS yaitu Asosiasi Internasional Spesialis Komputer Investigatif. Selanjutnya, pada tahun 1993, konferensi internasional pertama tentang bukti komputer diadakan dan pada Tahun 1995, organisasi internasional bukti komputer atau disingkat dengan IOCE terbentuk. Pada Tahun 1997, negara-negara G8 di Moskow menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus dilatih dan dilengkapi untuk mengatasi kejahatan berteknologi komputer internet yang akhirnya berlanjut pada Bulan Maret tahun 1998, Organisasi G8 menunjuk IICE untuk menciptakan prinsip-prinsip internasional, pedoman, dan prosedur yang berhubungan dengan bukti digital. Selanjutnya adalah pada Tahun 1998, terselenggara Interpol Forensic Science Symposium. Pada tahun 1999, FBI Amerika Serikat memiliki kasus dalam bidang *Cyber Crime* melebihi 2000 kasus, dengan memeriksa 17 terabyte data. Pada Tahun 2000,

Laboratorium Forensik FBI Regional Computer didirikan. Terakhir, pada tahun 2003, FBI memiliki kasus dalam bidang *cyber crime* melebihi 6500 kasus dan memeriksa 782 terabyte data.

Sebagai sebuah ilmu seperti ilmu kearsipan, digital forensik memiliki tahapan tertentu menurut Hyechin Blakeslee dalam bukunya *Use Of Computer Forensics Technologies In Crime Investigation* yang diterbitkan pada tahun 2009 serta penelitian yang dilakukan oleh Asrizal dan Zuhri Ramadhan dalam tulisannya berjudul Digital Forensik dan Penanganan Pasca Insiden yang merupakan mahasiswa S2 Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara (2013.) Tahapan pada digital forensik secara garis besar dapat dibagi kedalam empat tahapan, yaitu:

1. Identifikasi Bukti Digital (Acquisition)

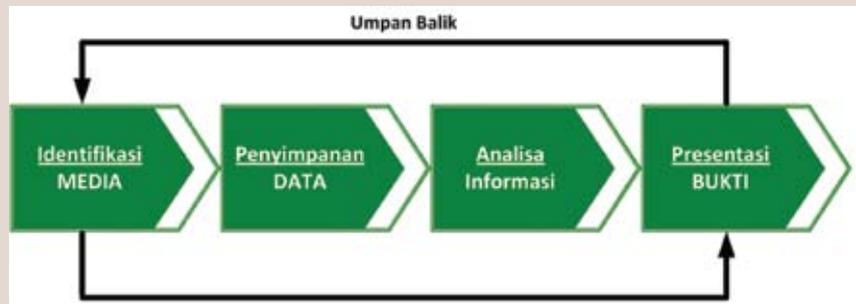
Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses penyelidikan. Segala bukti yang dapat digunakan untuk mendukung proses penyelidikan dikumpulkan. Proses penyelidikan dimulai dari dimana bukti itu berada, dimana bukti itu disimpan dan bagaimana cara penyimpanannya.

Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (seperti *flash disk*, *pen drive*, *hard disk*, atau CD-ROM), PDA, telepon genggam, *smart card*, short message service (SMS), *e-mail*, dokumen atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer.

2. Penyimpanan Bukti Digital (Preservation)

Tahapan ini mencakup penyimpanan dan penyiapan barang bukti yang ada, termasuk melindungi barang bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Barang bukti yang digunakan harus asli dan belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk dianalisis. Pada tahap ini diperlukan kemampuan yang tinggi dari seorang ahli digital forensik karena kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat tidak diakui di pengadilan. Pada tahap ini biasanya seorang ahli digital forensik akan melakukan kloning (penggandaan secara persisi, satu banding satu) pada setiap bukti digital dan hasil kloning tersebut yang akan digunakan dalam tahap analisa bukti digital untuk mencegah terjadinya perubahan pada bukti digital. pada proses ini yang terpenting adalah melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu.

Bukti harus benar-benar steril artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat membuat barang bukti digital



Tahapan-tahapan dalam digital forensik

tidak diakui di pengadilan. Bahkan menghidupkan komputer dengan tidak hati-hati bisa saja merusak/merubah barang bukti tersebut.

3. Analisa Bukti Digital (Analysis)

Tahapan ini dilaksanakan dengan melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu dieksplorasi kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan, antara lain: siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan (contoh: apa saja *software* yang digunakan), hasil proses apa yang dihasilkan, dan waktu melakukan).

4. Presentasi (Presentation)

Pada tahapan ini merupakan tahap untuk menyajikan dan menguraikan laporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Hasil laporan yang disajikan akan sangat menentukan dalam proses penetapan hukum. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa laporan yang disajikan sudah benar-benar akurat, teruji, dan terbukti.

Dari penjelasan di atas, digital forensik merupakan sebuah ilmu yang membantu perkembangan ilmu kearsipan. Ilmu kearsipan yang terfokus dalam segala bentuk rekaman kegiatan sangat terbantu dengan perkembangan ilmu digital forensik

yang terfokus pada penyimpanan data digital. Digital forensik menjadi salah satu ilmu bantu dalam perkembangan ilmu kearsipan. Dengan adanya ilmu digital forensik, ilmu kearsipan dapat berkembang semakin baik karena segala bentuk rekaman kegiatan dapat tersimpan dengan baik berkat tahapan-tahapan yang dilakukan dalam ilmu digital forensik. Di tengah serangan era teknologi yang semakin kuat, ilmu kearsipan juga harus siap menghadapi era tersebut. Digital forensik adalah jawaban untuk membantu menghadapinya meskipun tidak tertutup kemungkinan ilmu bantu lain untuk membantu perkembangan ilmu kearsipan. Ilmu kearsipan dan ilmu digital forensik di masa yang akan datang harus berjalan erat karena ilmu kearsipan sangat terbantu oleh perkembangan ilmu digital forensik sehingga permasalahan seputar penyimpanan data terutama data digital dapat terselamatkan seperti juga dalam ilmu kearsipan yang berusaha untuk menyelamatkan informasi. Kajian mengenai digital forensik juga harus terus dilakukan agar ilmu kearsipan terbantu dalam proses perkembangannya sehingga ilmu kearsipan juga semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Bayu Tanoyo :

AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK : UPAYA JAMINAN RELIABILITAS ARSIP

Seiring derasnya arus informasi di era digital yang semakin terbuka, semakin banyak informasi yang dipertanyakan kebenarannya. Satu hal yang menyebabkannya adalah tidak terjaminnya sumber informasi. Begitu pula dalam dunia kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai instansi yang memiliki kewajiban dalam pengelolaan arsip di Indonesia berkewajiban memiliki peranan dalam terjaminnya isi informasi dalam arsip.

Pasal 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Dalam konteks kearsipan menurut Luciana Duranti dalam bukunya *Preservation of the Integrity of Electronic Records* (2002) "Authenticity is protected and guaranteed through the adoption of methods that ensure that the record is not manipulated, altered, or otherwise falsified after its creation, either during its transmission or in the course of its handling

and preservation, within both the recordkeeping system and the record-preservation system". Dari penjelasan di atas maka autentikasi arsip menjadi upaya proses penentuan sumber informasi dalam arsip yang dapat dipercaya, asli, tulus, dan sah agar tidak terjadi manipulasi. Dalam konteks autentikasi arsip statis dapat berupa pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa suatu arsip statis adalah asli atau sesuai dengan aslinya.

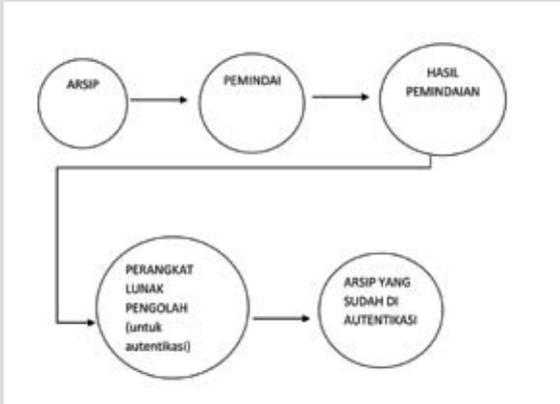
Adapun ketentuan mengenai autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Tentunya perlu

dibuktikan melalui pengujian terhadap arsip. Hal ini perlu memperhatikan kapabilitas, kompetensi, kemandirian dan integritas dalam penetapan arsip elektronik yang akan diautentikasi. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut harus pula didukung dengan metode, peralatan dan teknologi yang memadai serta bersinergi dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang autentikasi.

Mekanisme konsep autentikasi arsip elektronik di atas adalah bahwasanya arsip dalam bentuk fisik kemudian kita lakukan pemindaian (*scanning*) baik itu arsip konvensional (seperti kertas, kartografi, dan sebagainya) maupun arsip media baru (seperti film, foto dan sebagainya).



Contoh autentikasi arsip film yang ada di Arsip Nasional RI
(Label Arsip Nasional RI di bagian tengah)



Konsep sederhana dari autentikasi arsip elektronik

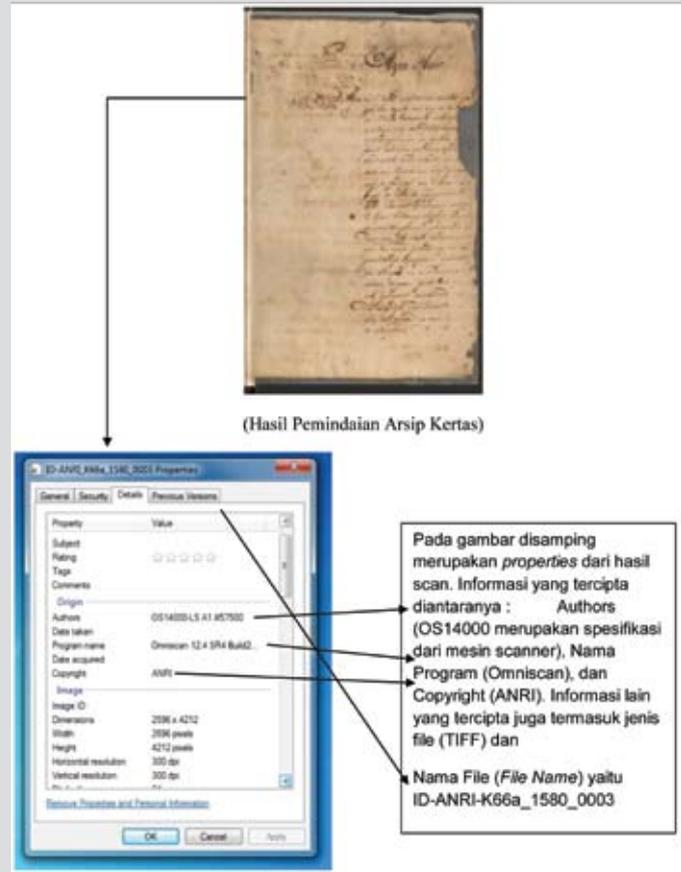
Tentunya dalam melakukan pemindaian tentu diperlukan peralatan yang mampu menunjang baik secara kuantitas maupun kualitas. Hasil pemindaian tersebut dalam berbentuk digital (*file*). Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan pemberian berupa logo ataupun label sebagai penanda darimana sumber itu berasal. Sebagai contoh adalah pada video bisa menggunakan aplikasi *Video Watermark Pro* (berbayar), *Adobe Premiere* maupun aplikasi lain yang memiliki kemampuan yang sama. Hasil akhir dari arsip tersebut tentu sudah terautentikasi. Unsur selain dari sarana tersebut perlu didukung dengan kebijakan dan juga sumber daya manusia yang mampu mendukung dari terlaksananya autentikasi.

Dariserangkaiantersebut, lembaga kearsipan harus mampu menjaga netralitasnya dalam penetapan autentikasi dan tidak menyandarkan sekadar pembuktian pada instansi dan/atau pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat mencederai kualitas pembuktian. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam autentikasi arsip. Arsip statis yang dikelola oleh ANRI dan dapat diakses oleh publik, autentikasi arsip dapat berupa pemberian tanda logo ANRI. Pada arsip statis dalam bentuk digital sebagai contoh film, pemberian nama ANRI pada bagian tengah bawah film merupakan salah satu upaya

autentikasi. Sedangkan untuk arsip statis dalam bentuk konvensional yang akan dialih media dalam bentuk digital, salah satu upaya yang dapat digunakan dalam autentikasi adalah metadata digital.

Metadata secara sederhana dapat diartikan sebagai data tentang data. Menurut *International Council on Archives (ICA) Study 16*, metadata adalah data yang mendeskripsikan konteks, konten, dan stuktur arsip dalam manajemen arsip. Sebagai contoh alih media dari arsip konvensional yang telah dipindai kemudian berubah menjadi arsip digital, ketika kita meng-klik *properties* pada arsip digital tersebut maka akan tertera informasi mengenai kapan pembuatan arsip digital, piranti yang digunakan dan hal spesifik lainnya.

Dari keseluruhan gambaran yang diinformasikan maka dengan adanya autentikasi arsip diharapkan timbul adanya keterpercayaan (*reliable*). Luciana Duranti dalam bukunya *Preservation of the Integrity of Electronic Records* (2002) pun menjelaskan



Contoh Mesin Scanner Omnicron 14000 alat tersebut dari sisi hasil scan secara langsung menciptakan metadata sehingga validitas sumber dapat reliable (dipercaya).

Reliability refers to the authority and trustworthiness of a record as evidence of what it is about, that is, to its ability to stand for the fact it speaks of. Jelas dengan tercipta arsip yang terpercaya maka sumber informasi arsip dapat dipertahankan karena autentikasi mampu menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya/sesuai fakta. Semakin terautentikasinya informasi maka semakin tinggi pula relevansi akan kebenaran atas informasinya. Hal ini pun menjadi langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi/ perusakan baik itu dari segi informasi maupun sumber informasinya.

DIGITALISASI ARSIP PERBANKAN DI LINGKUNGAN BANK INDONESIA

Menyusuri selasar gedung yang terletak di tengah pusat perkantoran Bank Indonesia yang merupakan “tanah emas DKI Jakarta” tepatnya Jl.Thamrin – Jakarta, akhirnya terlihat menjulang gedung tanpa kaca jendela dengan jumlah 8 lantai dan dibangun sejak tahun 1988, ya, itulah gedung Arsip dan Ekspedisi (Arsek). Gedung sebagai tempat penyelamat sekaligus penyimpan pelaksanaan kebijakan moneter dan memelihara stabilitas rupiah. Gedung ini menyimpan dan mengelola koleksi arsip dari sektor-sektor yang menjadi tugas pokok Bank Sentral, yaitu koleksi arsip Moneter, Sistem Pembayaran, Manajemen *Intern*, serta Perbankan yang saat ini tugasnya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koleksi arsip tersebut disimpan di gedung ARSEK lantai 3, 4, 5, dan 6.

Dipimpin oleh Sri Yulistiani selaku Deputy Direktur Unit Kearsipan Bank Indonesia Departemen Logistik dan Pengamanan, memiliki visi “menjadikan kearsipan Bank Indonesia yang kredibel dan terbaik di regional”, dengan misi “mewujudkan manajemen kearsipan berdasarkan prinsip - prinsip tata kelola terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia”.

Sri Yulistiani memiliki *passion* dalam membangun dunia kearsipan di lingkungan perbankan Indonesia. Beliau memiliki prinsip bahwa menyelamatkan arsip bangsa dan negara adalah menjadi sebuah keharusan. Semangat dan prinsip untuk menyelamatkan arsip hanya akan terwujud apabila kita berhasil



Gedung Sentral Khazanah Arsip Bank Indonesia



Deputy Direktur, Unit Kearsipan Bank Indonesia Sri Yulistiani

membuat masyarakat, terutama kaum muda, peduli arsip.

Kepedulian masyarakat pada arsip, dapat melahirkan Sumber Daya Manusia kearsipan yang handal dan profesional.

Sejalan dengan hal tersebut,

diharapkan regulator dapat membuat kebijakan dan ketentuan kearsipan yang inovatif, logis dan mudah diimplementasikan di era globalisasi dan informasi saat ini.

Guna mewujudkan kearsipan Bank Indonesia yang kredibel dan terbaik di tingkat regional, Bank Indonesia mencanangkan Program Transformasi Bank Indonesia yang salah satunya adalah Program *Institusional Leadership*, yang membuat Unit Kearsipan Bank Indonesia terdepan diantara lembaga-lembaga lain di Indonesia.

Pengelolaan Kearsipan Berbasis Standar ISO (*International Standards Organization*)

Dalam pengelolaan arsipnya, Unit Kearsipan Bank Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

PROFIL

KELENGKAPAN DOKUMEN ISO 30301 DAN ISO 15489 CONTOH : DOKUMEN		
DOKUMEN INDUK	DOKUMEN	
	DOKUMEN AUDIT	DOKUMEN PELENGKAP
<ol style="list-style-type: none"> Buku 1 : Manual Manajemen Dokumen Buku 2 : Prosedur Manajemen Dokumen Sasaran Manajemen Mutu Kebijakan Manajemen Dokumen Surat Edaran (SE) / Ketentuan terkait Penyelenggaraan Kearsipan, SOP Aplikasi Kearsipan, dsb SE Organisasi – Tugas dan Wewenang Pengelolaan Arsip Struktur Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> Penunjukkan Tim Audit Internal Rencana Kerja Audit Kertas Kerja Audit Rekap Temuan Audit Form Korektif Rekap Tindakan Korektif Form Tindakan Pencegahan Rekap Tindakan Pencegahan Efektifitas Hasil Training 	<ol style="list-style-type: none"> Penunjukkan MR/Wakil Manajemen Penunjukkan PIC kunci sarana simpan dokumen, di; <ol style="list-style-type: none"> Sarana simpan di Ruang Kerja Sarana simpan di Ruang Simpan Arsip (RSA) Sarana simpan di Sentral Khasanah Arsip (SKA) Jadwal Pemeliharaan <ol style="list-style-type: none"> Suhu Udara Kelembaban udara Kebersihan dokumen dan ruangan (clean desk policy) Pest Control Layout SKA dan RSA Pelaksanaan Kontrol APAR Tanda Evakuasi dan Tempat Berhimpun Prosedur Keadaan Darurat Laporan Pencapaian Sasaran Manajemen Mutu Profil Mitigasi Resiko Laporan MR/Wakil Manajemen Rapat Kaji Ulang Form Laporan Volume Arsip Form Bon Pinjam Arsip, DLSB

Dokumen-Dokumen yang dipersyaratkan dalam ISO 30301:2011-Management System for Records dan ISO 15489:2001 - *Record Management*

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Unit Kearsipan Bank Indonesia menggunakan pula Pengelolaan Kearsipan Berbasis Standar ISO, dengan memperoleh ISO 30301:2011-*Management System for Records* dan ISO 15489:2001 – *Records Management* secara bersamaan pada Maret 2015. Bank Indonesia merupakan lembaga pertama di Indonesia yang memperoleh ISO 30301:2011-*Management System for Records* ISO. Unit Kearsipan Bank Indonesia juga telah memperoleh ISO 9001:2008 *Quality Management* sejak tahun 2003 hingga sekarang. Selanjutnya, pada Maret 2015 Bank Indonesia memperoleh Sertifikat *Compliance* ISO 30301 dan ISO 15489 dari Badan Sertifikasi Internasional *Techniser Uberwachungs Sverein* (TUV) Singapore, yang berkantor pusat di Jerman.

ISO 30301:2011 - *Management System for Records* adalah standarisasi internasional di bidang *Management System for Records* (MSR), dengan cakupan *framework* pengelolaan dokumen yaitu penetapan strategi

informasi teknologi dengan sistem manajemen dokumen organisasi.

Kedua, *Legal Aspect*, yaitu standarisasi terhadap strategi dan kebijakan pengelolaan dokumen dengan berdasarkan pada ketentuan/perundang-undangan/ standar internasional yang berlaku, antara lain terkait dengan penetapan strategi dan kebijakan, tanggungjawab dan wewenang, serta penyusunan pedoman pengelolaan dokumen.

Ketiga, *Business Process*, yaitu standarisasi dalam proses pengelolaan dokumen yang mencakup antara lain kegiatan awal penerimaan/penciptaan dokumen, pemberkasan, penyimpanan, peminjaman/ penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, penyusutan, dan pelaporan volume dokumen, serta kebijakan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan

Sedangkan untuk ISO 15489:2011 – *Records Management* adalah standarisasi atas proses pelaksanaan pengelolaan dokumen/arsip yang berpedoman pada guideline yang ditetapkan, mencakup proses dari:

dan kebijakan, prinsip kearsipan, pendekatan proses, dan peran aktif Manajemen dalam implementasi *Management System for Records*. Standarisasi ISO 30301 meliputi:

Pertama, *Technologie Infrastructure*, yaitu standarisasi terhadap strategi dan kebijakan dalam penggunaan informasi teknologi yang handal, termasuk pengintegrasian

REQUIREMENT ISO:30301 MANAGEMENT SYSTEM FOR RECORDS	KEBIJAKAN MANAJEMEN DOKUMEN BANK INDONESIA (MDBI)
Technologie Infrastructure	Kebijakan penggunaan IT dalam implementasi kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi <i>Bank Indonesia Records Management</i> (BI- RMS) Untuk pendataan dokumen (non perbankan), terintegrasi ke seluruh satker di KP, KPwDN dan KPwLN. Aplikasi Digitalisasi Dokumen Perbankan Untuk pendataan dokumen perbankan, terintegrasi ke seluruh satker KP dan KPwDN Aplikasi BISASKA Untuk pencatatan penyimpanan, peminjaman arsip di Sentral Khasanah Arsip (SKA) di Kantor Pusat
Legal Aspects	<i>Legal Aspects</i> Pengelolaan MDBI mengacu pada; <ol style="list-style-type: none"> UU No. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan UU No. 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Ketentuan BI tentang Manajemen Dokumen Bank Indonesia (MDBI) Ketentuan Internal Bank Indonesia dan SOP Pengelolaan MDBI

Implementasi manajemen Kearsipan berbasis ISO 30301 dan ISO 155489 dilakukan dengan Kebijakan Manajemen Dokumen Bank Indonesia (MDBI) kurun waktu semester II 2014



Proses digitalisasi arsip di lingkungan BI

(1) Access; (2) Accountability; (3) Action Tracking; (4) Archival Authority; (5) Classification; (6) Classification System; (7) Conversion; (8) Destruction; (9) Disposition; (10) Document; (11) Indexing; (12) Metadata; (13) Migration; (14) Reservation; (15) Records; (16) Registration; (17) Tracking; (18) Records Center.

Dengan demikian, paduan antara ISO 30301:2011 - *Management System for Records* dan ISO 15489:2001 - *Records Management* merupakan standar internasional di bidang kearsipan yang saling melengkapi, sehingga memperoleh nilai rekomendasi yang sangat baik.

Digitalisasi Arsip Perbankan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013.

Dalam rangka mendukung program alih media dokumen perbankan tepat waktu dan tepat kualitas Sejak



Sertifikat ISO 30301 :2011 Management System for Records

tahun 2012 Bank Indonesia telah menetapkan Program *Initiative Charter* dengan membentuk *Task Force* Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank ke OJK, yang salah satu ruang lingkupnya menyiapkan scan dokumen perbankan yang akan digunakan oleh OJK. Dalam susunan keanggotaan *Task Force*, sebagai Ketua Forum Pengarah adalah Gubernur Bank

Indonesia Agus Martowardojo.

Pelaksanaan alih media dilakukan oleh Tim Arsip Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan membentuk Tim *Initiative Charter Document* yang diketuai oleh Kepala Departemen Logistik dan Pengamanan Heru Pranoto.

Dalam rangka memastikan proses pelaksanaan alih media dokumen perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melibatkan Departemen Audit Intern dan Departemen Hukum Bank Indonesia, Unit Kearsipan Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga otoritas kearsipan untuk melakukan assessment dalam proses alih media dokumen.

Assessment dilakukan di 4 (empat) Satuan Kerja (Satker) yaitu Departemen Pengawasan Bank 3 Kantor Pusat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Bandung), Wilayah III (Denpasar) dan Wilayah VIII (Padang). Dengan demikian diperoleh keyakinan bahwa proses alih media dokumen perbankan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 26 Februari 2014, Bank Indonesia memperoleh penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas kinerja luar biasa dalam pelaksanaan alih media dokumen perbankan. (RD)

ONNO W. PURBO :

E-GOVERNMENT BISA BERJALAN APABILA PELAKUNYA MEMANG MEMENCINTAI INFORMASI & ARSIP

Perkembangan dan penggunaan teknologi digital saat ini berkembang sangat pesat, bahkan penggunaan oleh organisasi publik tidak dapat dihindari. Bukan hanya penggunaan tetapi juga pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan. Dibalik pemanfaatan teknologi digital, kearsipan menjadi tulang punggung pemanfaatan teknologi tersebut.

Pemanfaatan teknologi digital sudah menyentuh sektor pemerintah dengan membawa teknologi kedalam pemerintahan yang biasa kita kenal dengan sebutan *e-Government*. Pemerintah berusaha menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga tercipta tata pemerintahan yang efektif, efisien, produktif dan responsif dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik melalui *e-Government* pemerintah melakukan beberapa cara diantaranya membangun beberapa aplikasi pendukung. Penerapan ilmu kearsipan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan perlu diimplementasikan dalam *e-Government*.

Onno W. Purbo seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi dan informasi yang juga seorang penulis dan pendidik mencoba memberikan tanggapannya mengenai perkembangan *e-Government* di Indonesia. Aktifis yang juga memperjuangkan Linux dengan beberapa karyanya tidak segan mengkritik pemerintah terhadap pelaksanaan *e-Government* tersebut. Disela-sela aktivitasnya yang sibuk Onno bersedia diwawancarai redaksi Majalah Arsip meskipun hanya melalui e-mail, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016. Berikut petikan wawancaranya :

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai media. Seperti apakah perkembangan media simpan pada saat ini dan di masa mendatang?



Praktisi Teknologi Informasi Onno W. Purbo

Salah satu contoh arsip yang paling besar namanya Google, Yahoo dan lain-lain. Mereka menggunakan harddisk kapasitas besar sekali dan bisa di search oleh seluruh dunia.

Tentang Media Simpan, Apakah akan bermunculan teknologi terbaru dari media simpan tersebut? kalau ada kira-kira seperti apa teknologi media simpan dimasa yang akan datang?

Basis-nya akan optik karena resolusinya lebih tinggi

Menurut Bapak, seperti apakah peranan teknologi informasi dan kearsipan dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis e-Government?

E-Government sebetulnya lebih ke arah layanan ke public, dibelakangnya memang membutuhkan teknologi untuk arsip, di atas arsip sebaiknya di jalankan aplikasi seperti bigdata, hadoop, giraph dan lain-lain. untuk menganalisa arsip tersebut. Teknik ini saat ini lebih banyak dipakai di dunia

telekomunikasi dan bank.

Bagaimanakah konsep ideal e-Office / e-Archive dalam penyelenggaraan pemerintahan? Dan bagaimana menguji autentikasi arsip elektronik yang dihasilkan dari sistem tersebut?

E-Office lebih ke arah mengefisienkan bisnis flow office. E-Archive lebih ke arah mengefisienkan pengarsipan, beda dengan e-office

Dari sisi teknologi, autentikasi bisa dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti digital signature, certificate authority yang secara open source dapat menggunakan software seperti GPG dan lain-lain. Sayang di Indonesia tidak banyak yang menguasai teknologi open source ini dan kita lebih banyak di jajah oleh vendor.

Teknologi Open Source terkenal dengan keterbukaannya, Bagaimana memberikan pengamanan terhadap teknologi tersebut, mengingat

teknologi tersebut terkenal kurang aman?

Siapa bilang kurang aman? Justru sebaliknya saat ini 90% server di Indonesia apalagi di Internet pakai open source.

Apakah ada aplikasi E-Archive yang ideal digunakan dalam proses administrasi perkantoran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan? Terutama berbasis open source?

Untuk e-archive bisa pakai file server biasa saja cuma harus dibuat besar sekali kapasitasnya, di linux bisa menggunakan LVM dengan fasilitas samba di atasnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PBB tahun 2014 dan disampaikan oleh BPPT bahwa Indonesia masih berada pada peringkat ke 106 dari 193 negara di dunia dalam pelaksanaan e-Government, menurut anda hal apa sajakah yang menyebabkan perkembangan e-Government di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara yang lain?

Kuncinya manusia, kunci utamanya adalah sistem pendidikan. terutama pendidikan teknik

Strategi apa yang bisa ANRI ambil untuk mengembangkan e-Government di Indonesia?

Fokuskan pada arsip secara elektronik yang bisa dengan mudah di akses oleh publik, sudah itu saja. Pasti anda akan di segani oleh semua orang. Sekarang ini teman2 banyak mengambil inisiatif sendiri untuk mengarsip data mereka.

Menurut anda, perlu langkah apa saja untuk meningkatkan e-Government di Indonesia?

Nomor satu dan paling penting Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, lepaskan ketergantungan pada vendor. Ketiga, rombak birokrasi agar membuat sistem efisien. Dan Keempat, ubah budaya & birokrasi agar bisa memaksimalkan IT. jangan dibalik.

Perluakah kearsipan Indonesia saling terkoneksi sehingga arsip mudah ditemukan?

Bukan sekedar interkoneksi. Butuh standarisasi API (Application Program Interface), butuh standarisasi struktur data, butuh kesepakatan untuk bigdata dan lain-lain.

Bagaimana konsep smart city yang saat ini sedang banyak diperbincangkan?

Kebanyakan kepala daerah arahnya lebih untuk membuat city-nya bisa dipantau dengan mudah. saya sendiri lebih suka kalau orang di city tersebut yang smart, bukan city-nya yang smart. tapi saya kan cuma rakyat biasa gak punya hak untuk membuat proyek smart city.

Bagaimana arsip dapat berperan dalam konsep smart city?

Secara teknologi ini termasuk kategori bigdata

Bapak banyak menyebut tentang Big Data diatas. Apa pengertian sederhana dari teknologi big data?

Google & Yahoo. Itu adalah bigdata. Software open source-nya basis utama-nya adalah hadoop

Strategi apa lagi yang dapat diambil ANRI selaku Pembina Kearsipan Nasional selain hal-hal

tersebut diatas dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi dan komputer (TIK)?

Kalau disederhanakan :

- Bikin Google
- Repository Server nasional
- Bikin torrent server nasional
- Bikin gerakan digitalisasi untuk di simpan di server tersebut

Cuma jujur, kalau pakai gaya proyek ini gak akan berhasil & gak akan langgeng ..

ini hanya bisa jalan kalau pelakunya memang mencintai informasi & arsip .. bukan sekedar proyek. (LH)

BIODATA

Nama Lengkap : Onno Widodo Purbo
Profesi : Pakar dibidang Teknologi Informasi
Agama : Islam
Tempat Lahir : Bandung, Jawa Barat
Tgl Lahir : 17 Agustus 1962
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

- S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung
- Pasca Sarjana Bidang Semi Konduktor Laser, McMaster University, Kanada
- Doktorat bidang Teknologi Rangkaian Terintegrasi untuk satelit, Universitas Waterloo, Kanada

Penghargaan

- 1987, Lulusan Terbaik, Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung.
- 1992, Masuk dalam buku "American Men and Women of Science", R.R.Bowker, New York (Amerika Serikat).
- 1994, Profil Peneliti, KOMPAS 26 Desember 1994.
- 1996, Menerima "Adhicipta Rekayasa", dari Persatuan Insinyur Indonesia.
- 1997, Menerima "ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award", dari ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO)
- 2000, Masuk dalam buku "Indonesia Abad XXI: Di Tengah Kepungan Perubahan Global", Editor Ninok Leksono, KOMPAS.
- 2000, Award for Indonesian Internet Figure, KADIN Telematika Award.
- 2002, Eisenhower Fellow, dari Eisenhower Fellowship (Amerika Serikat).
- 2003, Sabbatical Award, dari International Development Research Center (IDRC) (Kanada).
- 2005, Ashoka Senior Fellow, dari Ashoka (Amerika Serikat).
- 2008, Menerima "Gadget Award Exclusive Appreciation", dari Majalah Gadget.
- 2008, Menerima "IGOS Summit 2 Award", dari Menkominfo "Atas Semangat dan Perjuangan menyebarkan pemanfaatan Open Source di Indonesia.
- 2008, Masuk dalam buku "Indonesia 100 Innovators", Business Innovation Center.
- 2008, Menerima Gelar "Pahlawan Generasi Masa Kini" dari Modernisator.
- 2009, Indigo Fellow: Digital Community Fellow, dari PT Telekomunikasi Indonesia.
- 2009, Anugrah "TIRTO ADHI SOERJO" kategori Pelopor / Pemulai, dari Indonesia Buku.
- 2009, Anugerah "Competency Award 2009" dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- 2010, Anugrah "Tasrif Award" dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
- 2014, Ganesha Innovation Championship Awards (GICA) 2014.
- 2015, Penerima PIAGAM INTERNET Dalam MUNAS APJII VIII 2015.

CAPAIAN DAN PRESTASI PARA GUBERNUR DI BUMI GORA, JANGAN SAMPAI HILANG !



Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi (kanan)

Beberapa tahun terakhir ini siapa yang tak kenal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang terletak di kawasan kepulauan nusa tenggara ini menjadi trending topic dan melesat dengan capaian prestasi tidak hanya sebagai kawasan investasi baru ataupun pengembangan pariwisata yang mampu memikat turis dunia dan domestik saja tetapi juga mampu mengangkat masyarakat NTB dalam mencapai tujuan pembangunan millennium (MDGs) berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2015.

Capaian prestasi tersebut, tentunya tidak terlepas dari sosok kepemimpinan sang Gubernur TGH. Muhammad Zainul Majdi atau lebih populer di sapa dengan Tuan Guru Bajang (2008 – 2018 nanti). Asli putra Lombok dari pasangan HM. Jalaluddin SH, seorang pensiunan birokrat pemda NTB dengan Hj. Rahun Zainuddin Abdul Madjid, putri dari TGH. Zainuddin Abdul Madjid (Tuan Guru Pancor) seorang pendiri organisasi Islam Nadlatul Wathan. Tuan Guru Bajang bahkan sempat dinobatkan sebagai Gubernur termuda di Indonesia (berusia 32 tahun, saat pelantikan tahun 2008 lalu).

Pria kelahiran Pancor-Selong 13 Mei 1972 ini sebelumnya sempat menduduki Anggota DPR dari FPBB periode 2004 s.d. 2009. Kemudian hijrah ke Partai Demokrat dan kini menjadi Ketua DPD Demokrat di Provinsi NTB. Mengecap pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo sejak S1, S2 hingga S3 ini, menyediakan waktunya untuk mengemukakan sejumlah pandangan tentang berbagai hal dalam membangun 'bumi gora'—istilah kependekan dari 'gogo rancah' sebagai upaya mengembangkan sumber daya alam di wilayahnya termasuk harapan kedepan mengenai lembaga kearsipan kepada Wartawan Majalah

Arsip Bambang P. Widodo. Di sela-sela audiensi rombongan ANRI yang dipimpin Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan DR. Andi Kasman, SE, MM ke Gubernur sebelum berlangsungnya acara Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Arsiparis di kota Mataram tanggal 19 s.d. 20 April 2016. Dalam awal sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari ANRI terhadap kota Mataram sebagai tempat penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Arsiparis, semoga ini bentuk apresiasi nyata dalam memperkuat ketahanan nasional kita.

Berikut redaksi sajian petikan wawancaranya:

Apa visi kepemimpinan Bapak dalam membangun masyarakat NTB sehingga mampu menempatkan Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi yang berhasil mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) ?

Saya memahami bahwa pembangunan itu merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi meskipun ada perbedaan visi dan pendekatan dari pemimpin sebelumnya, setiap pemimpin yang baru pasti membangun fondasi dari pemimpin sebelumnya. Artinya, dalam membangun suatu daerah tidak terlepas dari proses kontinuitas dari pemimpin sebelumnya. Visi saya pada tahun 2008 saat terpilih menjadi Gubernur periode 2008 s.d. 2013 adalah membangun masyarakat NTB yang 'beriman' dan 'berdaya saing'. Beriman maksudnya disini tidak terlepas dari nuansa religius di NTB yang sangat kuat dan fakta sosial yang

nyata yaitu kehidupan keberagaman (taat beragama dan berbudi pekerti luhur) itu telah menjadi modal sosial bagi masyarakat NTB. Kemudian berdaya saing, bahwa harus diakui selama ini pembangunan SDM disini perlu ditingkatkan sehingga dengan program pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan daya saing secara global di segala aspek ipoleksosbudhankam.

Visi ini kemudian saya lanjutkan pada periode berikutnya tahun 2013 s.d. 2018 dengan menambah dari visi sebelumnya, yaitu dengan 'berbudaya' dan 'sejahtera'. Berbudaya disini maksudnya bahwa nilai-nilai budaya telah berperan sebagai panduan/pedoman yang diformalkan dalam bentuk awit-awit di desa-desa ternyata sangat efektif di dalam membentengi perilaku dan budaya asing sehingga kehidupan berbudaya pun perlu dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk dijadikan modal sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB. Semuanya, pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, disini orientasi kita tidak hanya membangun infrastruktur saja tetapi pembangunan yang dilakukan harus memberikan korelasi langsung bagi kesejahteraan masyarakat NTB. Jadi memasuki periode kedua kepemimpinan saya ini, mempunyai visi untuk pembangunan Provinsi NTB adalah untuk mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera.

Lantas program unggulan apa saja dari kepemimpinan Bapak yang sudah dilaksanakan?

Saya mencoba memberi prioritas pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan penekanan pembangunan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada beberapa program kita yang telah diadopsi secara nasional, contohnya jaminan persalinan atau 'Jampersal' dimana setiap masyarakat khususnya



Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat

wanita di NTB yang melahirkan berhak mendapatkan fasilitas kesehatan pada kelas tiga secara gratis. Dan, program ini setelah dua tahun berjalan diadopsi secara nasional menjadi coverage asuransi yang diperluas menjadi jaminan kesehatan nasional (Jamkesmas). Program jampersal kami telah mampu menekan angka kematian ibu dan bayi lahir, itu artinya manfaat program ini mampu berkorelasi terhadap semakin lamanya usia hidup seseorang. Pada bidang pendidikan, beberapa program juga telah mampu menjadikan provinsi NTB berstatus top mover atau percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat bagus dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 lalu. Peningkatan IPM ini tentunya menjadi program unggulan kita yang pertama karena mampu meningkatkan usia harapan hidup.

Program unggulan kedua, tidak terlepas dari karunia Allah SWT dengan melimpahnya sumber daya alam di wilayah NTB. Ada komoditas yang bisa tumbuh dan memberikan nilai ekonomi yang baik. Komoditas ini bukan karena komoditas ekspor tetapi komoditas yang sering digunakan masyarakat Indonesia atau dikonsumsi dalam negeri, seperti: padi,

jagung, rumput laut, dan sapi. Bahkan untuk kebutuhan konsumsi lokal, sapi, jagung, dan rumput laut, kami meningkatnya dengan istilah PIJAR telah berhasil menciptakan ketahanan daerah dan berimplikasi terhadap indeks rasio gini di NTB paling rendah di bawah gini rasio nasional sehingga mampu memperlihatkan adanya pengurangan kemiskinan. Saat ini selain PIJAR tadi kita punya produk tambahan, yaitu tebu. Kita punya basis industri gula yang siap berproduksi bula Agustus nanti. Dengan demikian, kalau lima komoditas strategis nasional yang ditetapkan pemerintah (beras, jagung, kedelai, tebu/gula, dan sapi) semuanya itu ada di NTB. Otomatis ini merupakan anugerah yang patut disyukuri dimana NTB telah menjadi bagian dalam mendukung ketahanan ekonomi bangsa.

Program yang ketiga, yang sedang digalakkan sejak tahun 2015 ini adalah membangun pariwisata dengan membangun konsep halal tourism atau wisata halal yang bertujuan untuk menjaring wisatawan dari Timur Tengah yang selama ini belum terserap/terjaring oleh pariwisata nasional. Dimana wilayah Lombok dan Sumbawa merupakan wilayah

destinasi baru di NTB sehingga perlu dilakukan penataan ulang, dengan tetap mempertahankan keaslian dan kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan dukungan Kementerian Pariwisata maka NTB telah menjadi provinsi pelopor dalam membangun destinasi 'halal tourism' sekaligus memberi nilai tambah dalam pengembangan ekonomi.

Program unggulan selanjutnya adalah membangun infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Provinsi NTB faktanya adalah salah satu dari tujuh provinsi kepulauan di Indonesia yang menjadi wilayah konektivitas keterhubungan dari satu titik ke titik lainnya. Oleh karena itu, kita sedang membenahi infrastruktur secara besar-besaran, baik itu infrastruktur transportasi (matra darat, udara, dan laut), infrastruktur sumber daya air, dan infrastruktur sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama untuk meningkatkan anggaran dengan menggunakan skema multi years sehingga provinsi NTB mendapatkan penghargaan dari pusat di dalam pembangunan 'kebinamargaan'.

Apakah program-program prioritas tersebut telah terdokumentasikan oleh Pemprov NTB sehingga dapat memacu daerah lain untuk mencontoh keberhasilan pembangunan di NTB?

Program prioritas tersebut tentunya sudah sesuai dengan RPJM Provinsi NTB sehingga keberhasilan yang diraih provinsi NTB ini bukan terjadi begitu saja tetapi melalui proses perencanaan yang matang dan terukur yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan kata lain keberhasilan ini merupakan bentuk kolektif dari seluruh masyarakat NTB untuk Indonesia. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saat ini setiap 1,2 juta ton beras hasil produksi kita lebih dari 50% telah dimanfaatkan oleh beberapa provinsi lain di Indonesia. Bahkan ini sudah berlangsung selama 10 tahun, dimana NTB telah menjadi

pemasok kontributor utama dalam ketercukupan kebutuhan beras di Indonesia. Demikian pula untuk Sapi Bali, meskipun namanya Sapi Bali tapi sebenarnya bibit terbaiknya berasal dari Lombok, karena bibit dari Lombok sejauh ini tidak ada satupun terkena wabah/penyakit genetik sehingga menjadi incaran bagi provinsi lain untuk mendapatkan bibit sapi dari Lombok. Ini yang banyak masyarakat kita tidak tahu, termasuk dalam pengembangan produk mutiara laut selatan yang diolah di negara Jepang, Korea, dan Hongkong, untuk kemudian dipasarkan di negara-negara eropa. Kita mencoba terus kembangkan dan menciptakan daya tumbuh atau istilah kita adalah Hilirisasi Produk Lokal. Langkah ini merupakan cara kami untuk memberikan bukti melalui program-program unggulan dan prioritas bahwa provinsi NTB senantiasa memberikan yang terbaik buat Indonesia.

Bagaimana dengan upaya peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTB ?

Upaya peningkatan pelayanan publik tetap menjadi prioritas dalam mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam tata kelola pemerintahan yang baik di NTB. Kalau kita bicara tentang KPK, mohon maaf terpaksa saya sebutkan bahwa di masa-masa awal KPK salah seorang Bupati di NTB terkena musibah menjadi pasien di KPK dan kemudian setelah itu ada lagi pejabat lainnya. Hal ini kalau dibiarkan tentunya berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan di NTB. Berkaca dari itulah kita mencoba membangun kredibilitas pemerintahan dengan membangun transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan partisipasi masyarakat. Alhamdulillah pada tahun 2014 di Provinsi NTB ini telah mendapat penghargaan sebagai peringkat pertama dalam keterbukaan informasi publik se Indonesia. Inovasi-inovasi tersebut bagian dari reformasi birokrasi atau bagian dari upaya peningkatan

pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam tata kelola keuangan kita, selama empat tahun berturut-turut ini telah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dimana tahun-tahun sebelumnya lebih banyak disclamer nya.

Tahun lalu, mulai dari 2014 kita punya program inovasi kampung media yang telah menjadi top nine (satu dari sembilan bentuk inovasi pelayanan publik terbaik se Indonesia). Untuk tahun ini juga ada program inovasi pelayanan publik kita yang masuk inovasi top 99 pelayanan yaitu program 'temukan arsip dalam tiga menit', bahkan dalam proses temukan arsip tersebut telah terjadi peningkatan atau perbaikan hingga menjadi 'temukan arsip dalam satu menit' dan kita berharap dapat masuk top nine lagi. Program 'temukan arsip dalam satu menit' ini merupakan kelanjutan dari upaya penataan arsip khususnya di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi. Jadi teman-teman disini telah membangun suatu direktori arsip dalam bentuk aplikasi e-arsip NTB yang dapat dimanfaatkan sebagai akses masuk untuk menemukan arsip. Inovasi ini telah teruji melalui berbagai kompetisi baik tingkat lokal maupun nasional, salah satunya dalam Kompetisi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2016, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2016). Inovasi ini telah berhasil menyisihkan 2.471 inovator lain dari seluruh Indonesia

Mengenai inovasi 'Temukan Arsip Dalam Tiga Menit yang kemudian berubah Menjadi Satu Menit ini baru sebatas di lingkungan pemerintah provinsi, bagaimana bapak memperluas jangkauan inovasi ini dengan melibatkan lembaga kearsipan sehingga dapat diterapkan juga di lingkungan SKPD dan kabupaten/kota?

Itu telah menjadi target saya, bahwa tahun 2016 sistem ini harus teradopsi di lingkungan SKPD dan



Tim Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB sedang memaparkan program “Temukan arsip dalam satu menit”

juga kabupaten/kota. Kita akan koordinasikan dengan melibatkan kepala lembaga kearsipan atau kepala Badan baik di provinsi ataupun kabupaten/kota sehingga mampu memotivasi untuk senantiasa memberikan pelayanan publik melalui akses informasi yang mudah dan cepat, serta dapat dipertanggungjawabkan validitasnya kepada masyarakat. Setidaknya program tersebut telah mengangkat harkat para pekerja di bidang kearsipan, tidak hanya bagi kami tetapi juga bagi instansi lain dalam upaya menampilkan inovasi pelayanan publik khususnya di bidang kearsipan.

Apa ada kebijakan khusus dari Bapak terhadap lembaga kearsipan di NTB ini ?

Sejauh ini kita memiliki depo arsip yang masih layak dan nanti kita coba melengkapi jika ada kekurangan terutama dari segi pengamanannya, misalnya dengan menambah CCTV. Untuk arsip yang di bawah 10 tahun yang masih tersimpan di SKPD akan segera kita pastikan mendapatkan yang baik. Disini peran Badan Arsip sebagai lembaga kearsipan daerah untuk mengontrol, membina, sekaligus

penanggungjawab penyelenggaraan kearsipan di daerah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menambah Arsiparis kita, karena itu perlu ada langkah-langkah implementatif yang cepat untuk pengadaan Arsiparis ini, minimal kebutuhan Arsiparis pada setiap SKPD dapat teratasi secara bertahap sampai dengan terpenuhinya jumlah Arsiparis yang ideal sehingga arsip-arsip hasil penyelenggaraan pemerintahan dapat terkelola dengan baik.

Kita berharap capaian dan prestasi yang diperoleh Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Bapak ini dapat terdokumentasikan sehingga menjadi memori kolektif daerah untuk generasi mendatang ? Mungkin ada program unggulan bagi lembaga kearsipan di NTB ini dalam waktu dekat ?

Saya melihat arsip itu penting terutama dari sisi proses penciptaan dan pemanfaatan, bahwa yang diarsipkan itu hasil dari pemikiran, kebijakan, pergulatan, institusi pemerintah dan masyarakat itu merupakan bagian dari sejarah dan kekayaan kita, jadi kalau itu hilang maka hilanglah sebagian kekayaan kita. Dari situ saya

menganggap arsip sangat penting dan bernilai sejarah bahwa rekaman sejarah kita merupakan jati diri kita sebagai suatu entitas daerah ataupun bangsa. Karena itu saya perintahkan Kepala Badan bekerjasama dengan Biro Humas untuk memprioritaskan dan merancang pembangunan memori kolektif dari para Gubernur dan pemerintahan, bukan hanya sejak kepemimpinan saya saja tetapi juga Gubernur sebelumnya sehingga pencapaian prestasi para Gubernur di Bumi Gora ini jangan sampai hilang. Saya berharap program pembangunan Memorial Gubernur tersebut dapat terwujud pada tahun 2018 dan menjadi program unggulan bagi lembaga kearsipan kami ini. Tentunya, kita akan melakukan riset kajian terhadap memorial para Gubernur terlebih dahulu dengan bekerja sama dengan ANRI, kemudian menyiapkan SDM nya, dan dukungan anggaran untuk membangun Memorial Gubernur tersebut. (BPW)

Intan Lidwina :

KONFERENSI SEAPAVAA KE-19

(ADVOCATE, CONNECT, ENGAGE)

South East Asia - Pasific Audio Visual Archive Association (SEAPAVAA) adalah asosiasi organisasi dan individu yang terlibat dalam perkembangan kegiatan pengarsipan arsip audio visual di wilayah Asia Tenggara (negara-negara anggota ASEAN sepuluh), Australasia (Australia dan Selandia Baru), dan Pasifik (Mikronesia, Melanesia, Polinesia). Asosiasi yang didirikan pada tahun 1996 ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan pengarsipan audio visual dan mempreservasi serta memberikan akses warisan budaya arsip audio visual.

Adapun keberadaan SEAPAVAA bertujuan untuk menyediakan forum regional untuk mengatasi masalah umum dan masalah yang berkaitan dengan pengumpulan dan pelestarian, serta penyediaan akses kepada warisan audio visual dari negara anggota. Secara khusus, SEAPAVAA berperan serta dalam :

- (1) Meningkatkan kesadaran dalam hal pengembangan pengarsipan audiovisual di tingkat nasional, regional dan internasional;
- (2) Memperkuat kemampuan nasional dalam akuisisi audio visual, manajemen, pelestarian dan penyediaan akses ke koleksi melalui penelitian, pelatihan serta transfer teknologi, antara metode-metode yang lain;
- (3) Melakukan studi teknis dan beberapa proyek yang menangani isu dan masalah umum;
- (4) Menetapkan wilayah dengan standar yang luas, metode dan prosedur;
- (5) Mendorong komunikasi dalam hal saling membantu, termasuk berbagi pengetahuan, keterampilan, jasa, sumber daya dan pengalaman antara



Suasana Konferensi SEAPAVAA ke-19

satu dengan yang lain; 6. Meningkatkan pengembangan profesional dan pengakuan dari para arsiparis audio visual; (7) Bekerja sama dengan badan-badan internasional yang relevan untuk mencapai pengakuan dan dukungan dari pengarsipan audio visual di wilayah internasional.

Sesuai hasil *General Assembly* ke-18 di Vientiane, Laos pada Tahun 2014, disebutkan bahwa dibutuhkan suatu penguatan terhadap interaksi dan kolaborasi antara negara anggota SEAPAVAA yang berasal dari individu, institusi, perusahaan, pemerintah, negara dan negara bagian/provinsi untuk mengembangkan pengarsipan arsip audio visual sepanjang pertemuan tahunan yang diadakan oleh SEAPAVAA.

Para komunitas Pengarsipan

Arsip Audio Visual diharapkan untuk terus melanjutkan dan memperkuat hubungan yang sudah terbentuk, dengan mengadakan berbagai dialog dengan partner lain dan *stakeholder* guna mencari solusi dan perencanaan strategis yang tepat. Solusi yang dikembangkan harus melibatkan banyak aspek untuk kepentingan bersama. SEAPAVAA juga mengharapkan agar lembaga kearsipan terutama yang menyimpan arsip audio visual semakin banyak diketahui dan diminati oleh masyarakat luas.

Pada Tahun 2015, *Asian Film Archive* (AFA) mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi ke-19 SEAPAVAA. Acara tersebut didukung penuh oleh *National Library Board* (Singapura) dan *National Archives of*

Singapore (NAS). Hal ini merupakan kali kedua konferensi SEAPAVAA diselenggarakan di Singapura setelah lima belas tahun berselang.

Pertemuan tahunan SEAPAVAA merupakan sebuah acara menjadi penting bagi para pengelola arsip audio visual. Konferensi tahunan menjadi wadah berkumpul bagi para arsiparis arsip audio visual untuk menjalin komunikasi, saling berbagi dan belajar satu dengan yang lain. Konferensi SEAPAVAA Tahun 2015 kemarin mengambil tema "*Advocate, Connect, Engage*". Isu *advocacy* merupakan salah satu tujuan utama di antara lembaga pengelola arsip audio visual di wilayah Asia-Pasifik yang akan dibahas secara mendalam konferensi tersebut. Di bawah tema tersebut, beragam topik yang dipilih untuk mengeksplorasi ketertarikan serta strategi advokasi (*advocacy*) yang inovatif untuk membangun hubungan (*connection*) antara pengelola arsip dengan *stakeholders* agar terlibat jauh. Itulah dasar dari pemilihan tema "*Advocate, Connect, Engage*".

Penyelenggaraan Konferensi SEAPAVAA ke-19 bertempat di *National Library Building* dan *National Museum of Singapore*. Di *National Library Building* juga terdapat sebuah organisasi *Asian Film Archives* yang berperan penting dalam SEAPAVAA khususnya dalam penyelenggaraan konferensi SEAPAVAA tahun ini. Kebetulan penulis berkesempatan untuk mengikuti rangkaian acara konferensi tersebut.

Konferensi ke-19 SEAPAVAA dihadiri oleh 188 delegasi yang berasal dari 28 negara di antaranya Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Fiji, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Laos, Malaysia, New Caledonia, Norwegia, Papua Nugini, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru, Singapura, Swedia,

Swiss, Taiwan, Thailand, Inggris, dan Vietnam.

Sesuai dengan tema pada tahun tersebut, pembahasan dalam diskusi kegiatan SEAPAVAA lebih banyak mengenai langkah-langkah yang dapat dipilih dalam strategi advokasi. Hal ini termasuk pentingnya melakukan kegiatan kerja sama dengan organisasi-organisasi lain terutama dengan para politikus dan pemegang kekuasaan saat ini, membentuk suatu komunitas kearsipan juga sangat penting, karena hal tersebut sebagai salah satu bentuk penguatan pentingnya keberadaan lembaga pengelola arsip. Kerja sama dengan *stakeholder* dan pemberian akses sangat penting sebagai inti dari kegiatan promosi arsip kepada masyarakat luas secara kesinambungan. Dalam kegiatan ini ditekankan juga bahwa perencanaan dan strategi jangka pendek maupun jangka panjang dalam mengembangkan lembaga kearsipan sangatlah penting untuk dilakukan. Terkait dengan kendala biaya yang dialami oleh mayoritas organisasi kearsipan dari berbagai negara, pada kesempatan itu dibahas juga secara

interaktif mengenai cara mencari dana agar tidak selalu mengandalkan anggaran dari pemerintah.

Pada acara diskusi panel lainnya juga turut dibahas mengenai perkembangan teknologi restorasi audio visual terkini dengan pemaparan yang dilakukan perwakilan dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang restorasi film/arsip audio visual. Salah seorang pembicara dalam kegiatan tersebut membahas mengenai pengetahuan di balik dunia digital. Pembicara tersebut memaparkan beberapa hal mendasar pada audio digital dan video digital (*container, codec, raw data*, dan sebagainya). Pembicara tersebut mengajak para peserta untuk melihat bagaimana memilih format *file* yang tepat dan sesuai dengan situasi nyata yang terjadi serta bagaimana menangani *file* tersebut untuk jangka waktu yang lama. Para pembicara lain juga menyampaikan pengalaman mereka dalam melakukan kegiatan restorasi film/arsip audio visual. Beberapa perusahaan yang hadir dalam kegiatan tersebut menangani restorasi film/arsip audio visual



Delegasi Indonesia pada acara Konferensi SEAPAVAA ke-19

menerangkan bahwa perusahaannya telah melakukan restorasi film dengan resolusi SD/HD/2K/4K/6K/8K. Bahkan diperkirakan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan besar kemungkinan format resolusi arsip yang didigitalisasi akan lebih dari 8K karena teknologi terus mengalami perkembangan yang signifikan.

Hal ini tentu saja jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Situasi yang ada di ANRI, digitalisasi arsip audio visual dilakukan dari *reel* film yang kemudian didigitalisasikan ke dalam format resolusi HD dengan bentuk format penyimpanan/*file* AV. Walaupun bentuk format resolusi yang dihasilkan dari digitalisasi masih menggunakan format HD akan tetapi tetap saja membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Semakin tinggi tingkat resolusi yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula ruang penyimpanan yang diperlukan. Dapat digambarkan bahwa sebuah arsip audio visual berdurasi pendek yang digitalisasi ke dalam format resolusi HD memiliki kapasitas ± 10 GB (*Gigabyte*) maka apabila digitalisasi yang dilakukan di ANRI menggunakan resolusi 2K maka hasil digitalisasi tersebut akan 2 kali atau lebih dari yang dihasilkan dalam format resolusi HD. Dari segi penyimpanan hasil digitalisasi, ANRI menggunakan server yang dapat menampung hingga ± 200 Terabyte. Hal ini tentu saja sangat jauh dari cukup apabila ANRI melakukan digitalisasi seluruh arsip audio visual yang dimiliki. Terlebih pada saat ini, server yang ada tidak hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil digitalisasi arsip audio visual tetapi juga semua arsip yang dimiliki oleh ANRI yang telah didigitalisasi termasuk arsip tekstual. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa meskipun disimpan ke dalam satu server tetapi partisi penyimpanannya berbeda antara hasil digitalisasi arsip audio

visual dengan arsip tekstual.

Pada konferensi ke-19 SEAPAVAA tersebut ditekankan juga mengenai pentingnya restorasi arsip audio visual untuk menjaga informasi agar tetap dapat disampaikan kepada masyarakat. Terutama dalam hal penyelamatan konten yang terdapat pada arsip agar dapat dibaca dengan menggunakan peralatan yang modern. Namun demikian, yang lebih penting dari semuanya adalah bagi lembaga atau organisasi kearsipan adalah terlebih dahulu melakukan digitalisasi arsip audio visual. Hal ini guna memperkecil hilangnya konten pada arsip audio visual yang mengalami kerusakan parah yang disebabkan oleh jamur, *vinegar syndrome*, dan sebagainya. Pada prinsipnya sangatlah penting bahwa arsip audio visual dapat bekerja atau dibaca sesuai dengan *file format* yang menyertainya yang merupakan *open source* bagi masyarakat luas, mudah digunakan dan didokumentasikan dengan baik, dan digunakan oleh komunitas pengguna arsip, dan lain sebagainya.

Di penghujung acara diskusi diadakan sebuah sesi forum diskusi panel yang melontarkan pertanyaan "*Where does long term preservation fit in the digital world and what will remain in the 22nd Century?*" (Terjemahan bebas: Preservasi jangka panjang seperti apa yang cocok digunakan di dalam dunia digital dan apa yang akan bertahan (ada) pada abad ke 22?). Dalam diskusi panel tersebut dilontarkan beberapa pertanyaan dari peserta termasuk pertanyaan mengenai arsip audio visual mana yang disimpan setelah mengalami restorasi

Diskusi panel akhirnya menyimpulkan pentingnya melakukan restorasi arsip-arsip audio visual ke dalam bentuk digital dan pentingnya untuk tetap menyimpan arsip aslinya dan juga arsip yang telah mengalami

restorasi. Hal ini disebabkan arsip audio visual yang asli merupakan rujukan dari arsip yang telah mengalami restorasi termasuk bahan rujukan penelusuran atas perubahan yang terjadi setelah direstorasi.

ANRI dalam hal ini sebagai lembaga kearsipan memiliki tugas yang cukup berat untuk menjalani komitmen yang dibuat sebagai anggota SEAPAVAA. Terkait dengan banyaknya jumlah arsip audio visual yang dimiliki oleh ANRI yang sebagian besar masih dalam format aslinya, sangatlah penting untuk segera mungkin seluruh arsip audio visual tersebut dialihformatkan ke dalam bentuk digital. Tentu saja sehubungan dengan kendala alat pemutar arsip audio visual/film yang saat ini sudah langka, hal tersebut segera harus dicarikan solusi. Digitalisasi arsip audio visual, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti penyediaan *server* dengan kapasitas hingga zetabyte (satu milyar terabyte). Selain itu yang terpenting juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan di ANRI untuk terus mengembangkan kemampuannya, terutama di bidang teknologi dan informasi yang melaju semakin pesat.

Semua hal itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, kendala biaya akan sedikit teratasi dengan membangun hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat melalui mengenalkan, mempromosikan, serta mempublikasikan arsip kepada masyarakat dengan pendekatan yang modern. Salah satunya adalah dengan mengadakan acara menonton bersama film lama dengan konsep serta tema yang menarik. Dengan demikian masyarakat akan paham bahwa arsip bukan sekedar lembaran kertas, foto atau pita film biasa, akan tetapi arsip merupakan rumah memori bagi kita, bangsa Indonesia. Oleh karenanya pelestarian arsip adalah sebuah keharusan dan kewajiban bersama.

Parno Nusantara

IMPLEMENTASI PRASARANA KEARSIPAN DAN ANTI BENCANA DI *NATIONAL ARCHIVES OF KOREA*

Fase pemerintahan Korea Selatan (Korsel) dimulai dari periode tiga kerajaan (2333 SM-668 M), Periode Persatuan Kerajaan Shilla (668-935 M), Dinasti Goryeo (918-1392 M), Dinasti Joseon (1392-1910 M), Masa kekaisaran Jepang (1945-1950 M), Perang Korea (1950-1953 M), sampai dengan sekarang yaitu Pemerintah Republik Korea Selatan. Di antara fase-fase tersebut, arsip tertua yang tersimpan adalah *Samguk Sagi* (Sejarah Tiga Kerajaan: Gogiryeo, Baekje, Shilla) yang dibuat Tahun 1145 M, kemudian arsip Sejarah Goryeo.

Pencatatan dan pendokumentasian aktivitas kerajaan sudah berjalan rutin pada masa Dinasti Joseon. Saat itu terdapat satu jabatan atau profesi khusus bernama *Sagwan* yang bertugas mendokumentasikan segala aktivitas raja baik secara formal maupun informal (rapat kerajaan, ataupun upacara kerajaan). Dokumentasi tersebut direkam dalam catatan yang ditulis oleh *Sagwan* dalam sebuah buku riwayat yang bernama *Sacho*. Buku riwayat tersebut tidak dapat diakses oleh siapapun dan disimpan di tempat khusus. Kompilasi *Sachosacho* tersebut baru akan dilakukan apabila raja sudah meninggal. Kompilasi *Sacho* disebut *Sillok*. *Sillok* duplikasikan sebanyak 3 eksemplar dan dilestarikan di 4 tempat yang berbeda. Metode pelestarian seperti inilah yang masih digunakan sampai saat ini di *National Archives of Korea*.



Samguk sagi (History of three kingdom)

Arsip yang dihasilkan pada masa itu antaralain: *Seonghwabo* (*Genealogical records*) dan *Yeoyoudang* (Karya kesusastraan pada masa situ). Pada masa kekaisaran Korea (Dinasti Joseon Kontemporer) 1894-1910 M, telah dibentuk Pusat Arsip di setiap departemen kekaisaran, kemudian berlanjut pada masa kolonial Jepang di mana kearsipan pada masa tersebut dilaksanakan untuk kepentingan administrasi kolonial yang mengelola arsip personal dan kebijakan kolonial yang diterapkan di Semenanjung Korea. Hal tersebut berlanjut sampai terjadinya Perang Korea (1950-1953 M).

E-Government in Korea

Penilaian *UN e-Government Development Index Ranking* Tahun 2014 menunjukkan bahwa Korea Selatan menduduki peringkat pertama penyelenggaraan *E-Government* di dunia. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari penyelenggaraan kearsipannya. Penyelenggaraan kearsipan di Korsel merupakan salah satu fungsi yang sangat dominan

dalam pelaksanaan *E-Government* di Korea karena penyelenggaraan kearsipan telah menjadi bagian besar implementasi *E-Government* Korsel.

Undang-undang yang mendasari penyelenggaraan kearsipan di pemerintah Korsel adalah *Public Records Management Act* yang pertama kali diundangkan Tahun 1999 dan sudah beberapa kali direvisi dan terakhir tahun 2006 sampai dengan sekarang, tentu saja isi dari kebijakan tersebut telah mengadopsi beberapa standar Internasional salah satunya adalah *General International Standard Archival Description* (ISAD-G) dan KS X ISO 1589. Beberapa poin penting *Public Records Management Act* pada saat pertama kali diundangkan Tahun 1999 yaitu: menetapkan standar Klasifikasi Arsip, kewajiban registrasi arsip ketika di terima/diciptakan, dasar pendirian institusi yang mengelola arsip, dan mengamanatkan peningkatan keahlian dalam pengelolaan arsip

Sedangkan beberapa elemen kunci setelah di revisi terakhir Tahun 2006 adalah memperkuat sistem

UN e-Government Development Index Rankings

Country	Ranking by Year								Rank Difference (2012-2014)
	2014	2012	2010	2008	2005	2004	2003	2001	
Korea	1	1	1	6	5	5	13	15	
Australia	2	12	5	5	12	11	11	8	▲10
Singapore	3	10	4	10	4	3	5	7	▲7
France	4	6	7	2	2	2	4	9	▲2
Netherlands	5	2	2	4	1	1	1	1	▽3
Japan	6	18	10	9	23	24	19	14	▲12
US	7	5	12	1	3	4	2	11	▽2
UK	8	3	6	3	10	10	7	5	▽5
New Zealand	9	13	19	15	9	9	10	13	▲4
Finland	10	9	11	23	7	6	3	4	▽1

The Republic of Korea has retained the top spot from 2010 to 2014

Ranking pengembangan E-Government

dan fungsi yang mengelola arsip, mengatur pengelolaan arsip elektronik di setiap proses kerja pemerintahan, mengatur akses public terhadap arsip dan memperkuat khasanah dan pengelolaan arsip dari sektor privat yang bernilai penting

Terminologi yang digunakan untuk menyebutkan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis pada pemerintahan Korsel adalah “records”. Sedangkan “archives” merupakan terminologi yang di gunakan pemerintahan korea untuk menyebutkan institusi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola dan melestarikan arsip statis.

Selain sebagai institusi yang berwenang melestarikan records yang bersifat permanen, National Archives of Korea mempunyai tugas dalam hal pelestarian arsip. Metode pelestarian arsip (Preservasi) di National Archives of Korea ada dua. Pertama, Preservasi preventif (*Preventive preservation*); mengurangi resiko dari kerusakan yang akan datang dan mengurangi laju degradasi kondisi arsip dengan pengelolaan lingkungan preservasi dengan cermat.

Kedua, Preservasi preskriptif

(*Prescriptive preservation*); seluruh upaya preservasi arsip termasuk mengembalikan kondisi arsip dan memperbaiki kerusakan sehingga dapat diakses kembali informasinya

Prasarana Kearsipan

Sebagai salah satu pendukung dalam pelestarian arsip National Archives of Korea mempunyai standar yang digunakan dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana maupun kesiapan dalam menghadapi bencana.



Penyimpanan arsip

1. Stack Room (Ruang Penyimpanan Arsip)

Parameter standar yang digunakan kurang lebih tidak berbeda jauh dengan standar parameter yang digunakan institusi kearsipan di negara lain. Sebagai perbandingan dengan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia parameter standar ini bisa dilihat pada Peraturan Kepala (Perka) Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman Preservasi Arsip.

Sebagai contoh gambar adalah Stack Room di National Archives Korea yang terdiri dari Stack Room Film dan Kertas. Suhu dan kelembaban kedua ruangan berbeda mengikuti standar yang telah di tetapkan. Penyimpanan arsip kertas pada Stack Room bersuhu 18-22°C dengan kelembaban 40-55% sedangkan penataan arsip kertasnya ditata seperti penyimpanan pada umumnya. Pada penyimpanan film suhu Stack Room -2 ~ 2 °c dengan kelembaban 25-35%, sedangkan sistem penataan filmnya disimpan satu can film per shaft (baris). Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit film seperti jamur cepat menyebar ke film yang lainnya.

Ada satu poin penting, ketika film akan di bawa keluar dari *Stack Room* baik untuk di digitalisasi maupun direstorasi, film tersebut akan di simpan ke ruangan transit yang suhunya pertengahan antara *Stack Room* dan Ruangan digitalisasi atau restorasi.

2. Electrical System

Untuk memperoleh kondisi prasarana yang diharapkan sesuai parameter standar yang telah ditetapkan, beberapa peralatan telah terintegrasi seperti terlihat pada gambar. *Electrical system* terdiri dari ruangan *electrical switchgear*, *electrical panel control* dan *HVAC system*. Fungsi *HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)* adalah pengendali suhu dan kelembaban udara dalam sebuah gedung yang juga menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan antar ruang, dan menyediakan udara segar bagi *Stack Room* untuk ruang penyimpanan arsip. *HVAC system* terdiri dari 2 unit yang bekerja secara *redundant*. Bila satu HVAC bermasalah, maka satunya lagi akan menyongkong power sistem. *HVAC System* ini terkoneksi langsung dengan *Stack Room* yang dikontrol oleh *HVAC system*. Untuk pengamanan dari bahaya kebakaran, prasarana kearsipan pada *Stack Room* telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya di antaranya adalah *gas type fire extinguisher*, *smoke detector*, *fire extinguisher*, *hydran* luar, dan sebagainya.

3. Fasilitas Pengamanan

Arsip Nasional Korsel telah mengintegrasikan pengamanan di dalam maupun di luar ruang dengan perkembangan teknologi Informasi seperti CCTV, *Electronic Card*, RFID dan lain-lain. RFID System sendiri telah terkoneksi langsung dengan



Fasilitas anti bencana

CAMS (*Central Archives Management System*) sehingga keluar masuk arsip terdeteksi secara *Real time*

4. Fasilitas Anti Bencana

Lembaga kearsipan maupun Institusi pemerintah maupun swasta pada umumnya mempunyai strategi tersendiri dalam perencanaan bencana (*Disaster Planning*). Di Indonesia, penyelenggaraan kearsipan dalam penanggulangan bencana telah di atur berdasarkan Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana. National Archives of Korea mempunyai aturan mengenai penanggulangan bencana ini berdasarkan *Public Records Management Act*. Letak geografis yang dikelilingi pegunungan, pengalaman perang saudara pada masa lalu maupun antisipasi bencana lainnya membuat *National Archives of Korea* mengembangkan fasilitas anti bencana.

- Desain dan konstruksi *repository* yang berorientasi pada *seismic*.
- Mampu bertahan tanpa kerusakan apapun sampai dengan 6 *magnitude*.

- Fasilitas pencegahan terhadap banjir.
- Sistem drainase bawah tanah permanen. Sebagian lokasi *Repository* berada di bawah bukit yang berperan sebagai perlindungan alami, sehingga membutuhkan sistem drainase yang baik yang berguna untuk mengantisipasi aliran air dari atas bukit
- Fasilitas terhadap perang dan terror yang *responsive*.
- *Repository* dibangun dengan dinding anti ledakan dan fasilitas perlindungan serta penghalang anti teror.
- Lokasi *repository* dibuat di antara perbukitan sebagai salah satu strategi apabila terjadinya perang untuk memudahkan evakuasi dan penyelamatan.
- Fasilitas terhadap ancaman kebakaran.
- Peralatan pencegahan kebakaran secara otomatis dengan sistem "Tirai Air" yang akan mengalirkan air ke seluruh dinding luar gedung

Busan Repository



Seoul Repository



Daejeon Repository



Presidential Archives



depo.

- Proteksi terhadap arsip elektronik.
- Sistem perlindungan terhadap *Electronic Magnetic Pulse* (EMP) yang dapat merusak informasi arsip elektronik dan peralatannya.
- Penetapan rencana Penanggulangan bencana dan langkah taktisnya.
- Simulasi rutin penanggulangan bencana dan penanganannya dilakukan untuk menghadapi kemungkinan terburuk yaitu perang maupun kebakaran. Peralatan pengamanan sudah tersedia pada masing-masing lantai *Stack Room*.
- Pengaturan akses kontrol.

- Sistem keamanan yang diterapkan standar bandara udara internasional.
- Pengaturan keamanan arsip.
- Pengaturan keluar – masuk arsip dengan RFID.
- Sistem relasi takstis dengan institusi keamanan
- Membangun sistem yang *responsive* dengan institusi pemadam kebakaran, kepolisian, dan militer
- Digitalisasi
Menciptakan *back up* (data cadangan) melalui digitalisasi, Hal ini dilakukan mengikuti tradisi penyimpanan *Sillok* pada masa Dinasti Joseon. Setiap melakukan digitalisasi, akan

dibuatkan 3 buah copy dan 1 buah master hasil digitalisasi. Adapun *repository* yang digunakan tergantung kebijakan *National Archives of Korea*. Bisa disimpan di Repository Bussan, Seoul, Daejeon maupun Presidential Archive.

National Archives of Korea telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kearsipan khususnya dalam pengelolaan arsip. Dalam hal ini, *National Archives of Korea* telah membuktikan bahwa perkembangan dunia kearsipan sejalan dengan perkembangan dunia teknologi.

Ringga Arif WH :

MENCARI JEJAK SANG KAKEK

Matanya masih menatap ke arah bangunan yang berada di seberang Jalan Penataran, Blitar. Bangunan tua yang dulunya dipakai sebagai markas pasukan Brigade V, pasukan yang bertugas untuk menangkal serangan pasukan Belanda yang hendak masuk kota (kembali). Sekarang bangunan itu sudah reyot, nampak dindingnya banyak yang retak, dan atapnya bolong di mana-mana. Kalau malam tiba, suasana di sekitar bangunan itu mengerikan, kendaraan yang lewat pun tak ada yang berani berjalan pelan, pengemudi memacunya dengan kencang. Pohon beringin yang besar tumbuh di sisi timurnya.

Namanya Kardi. Sudah 25 tahun dia tidak menginjak kakinya di kaki Gunung Kelud ini. Sejak berusia 7 tahun, ibunya telah membawanya ke Berlin. Dia menghabiskan masa remajanya di sana, gelar Master Ilmu Sejarah pun telah disandangnya dari kampus ternama di Jerman. Sebelum meninggal, ibunya pernah bercerita tentang kakeknya yang gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Kakekmu bernama Wiryono Utomo. Ia adalah seorang pejuang yang merelakan hidupnya untuk kemerdekaan," kenang Kardi mengingat cerita ibunya. Kardi mencoba mengingat kembali setiap kisah sang kakek melalui cerita lisan ibunya. "Hari itu hari Sabtu, saat agresi militer II terjadi". Suasana sangat mencekam. Tank dan panser pasukan Belanda menembaki rumah penduduk dan kantong-kantong persembunyian gerilyawan. Kakekmu meminta nenek

membawa Ibu dan budhemu untuk mengungsi ke Mojokerto, sampai keadaan kota aman. Itu adalah terakhir kalinya Ibu melihat kakekmu".

Berebekal alamat yang diberikan oleh ibunya, Darmini, Kardi yang telah seminggu di Blitar berangkat menuju Mojokerto. Dia naik kereta api dari stasiun Blitar pukul sembilan pagi, karena masih ada waktu sekitar 30 menit sebelum kereta berangkat, Kardi mampir di warung kopi yang berada di seberang stasiun untuk sarapan dan menyeruput kopi.

"Ini Pak, nasi pecel dan kopinya," kata penjualnya.

"Terima kasih, Mas. Sudah lama berjualan di sini?" tanya Kardi.

"Baru sekitar 5 tahun, Pak. Bapak ini belum lama di Indonesia ya, kok sepertinya saya melihatnya begitu?"

"Betul, Mas, baru seminggu ini saya di Blitar, sejak kecil saya tinggal di Eropa" jawab Kardi dengan tertawa sambil menyantap makanannya. "Blitar memang masih asri ya, Mas? Belum banyak gedung-gedung tinggi dan kemacetan lalu lintas."

"Iya beginilah Blitar, Pak, makanya saya juga betah tinggal di sini. Setelah menikah, memang saya menetap di sini bersama istri," terangnya.

Banyak yang mereka berdua bicarakan, sembari si penjual itu membuatkan makanan dan minuman untuk pembeli lainnya.

Dari dalam stasiun terdengar suara bahwa kereta Kahuripan sudah tiba. Bergegas Kardi membayar dan meninggalkan warung itu.

"Kakek hendak pergi ke mana?" tanya Kardi kepada lelaki tua berkacamata tebal yang duduk disampingnya. Lelaki itu mengenakan pakaian veteran, lengkap dengan topi. Usianya sekitar 85 tahun.

"Saya mau ke rumah cucu di Mojokerto, Mas, sudah lama saya tak berkunjung ke sana. Kalau Mas sendiri mau ke mana?" tanya lelaki tua itu.

"Sama, Kek. Saya juga mau ke Mojokerto. Ke rumah adiknya kakek saya di sana. Perkenalkan nama saya Kardi, kalau nama Kakek siapa?" tanya Kardi sambil mengulurkan tangan untuk berjabat.

"Saya Kartono," ucapnya. Saat memandang wajah Kardi, Kartono teringat akan anaknya yang pertama, Suparman. Dia tewas saat penyerbuan serdadu Belanda di Blitar. Di kereta itu, Kartono memang bercerita banyak hal kepada Kardi. Walaupun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, namun dengan cepat keduanya saling akrab. Kardi lebih banyak mendengarkan cerita Kartono, dengan semangat berapi-api Kartono menceritakan perjuangan dirinya dan teman-temannya melawan Belanda yang ingin menancapkan kukunya kembali di bumi pertiwi. Berdasarkan kisah yang dituturkan oleh Kartono, Kardi tahu bahwa dalam satu batalyon, hanya tinggal dua orang yang masih hidup sampai sekarang, Kartono dan temannya yang bernama Kasman. Sejak tahun 2000, Kasman tinggal di kediaman anaknya di Palembang.

Tak terasa kereta sudah tiba di

CERITA KITA

stasiun Mojokerto. Sebelum berpisah, mereka saling bertukar nomor telepon dan alamat rumah. Di depan stasiun, Kartono sudah dijemput cucu laki-lakinya yang menaiki sepeda motor. Mereka berjabat tangan, dan Kardi lantas mencari bus.

Rumah nomor 18 di Jalan Munggur itu dipandanginya setelah turun dari bus. Rumah limasan yang masih terawat, dengan halaman yang luas di depannya serta banyak ditumbuhi pohon mangga dan rambutan. Tampak seorang nenek tua sedang menyapu teras depan. Saat Kardi menekan bel rumah yang terletak di pagar, nenek itu mendengar dan menyuruh seorang gadis untuk membukakan gerbang.

"Maaf, mencari siapa, Mas?" tanya perempuan itu.

"Apa betul ini rumah Pak Kasan Dimejo?"

"Iya, silakan masuk. Itu Ibu sedang menyapu teras depan," sambil menunjuk ke arah nenek tua itu yang tak lain adalah ibunya.

"Mau minum apa, Mas?" tanya nenek tua yang belakangan dia tahu bernama Martini.

"*Waduh..* malah merepotkan, teh saja Bu," jawab Kardi. Lantas Martini meminta anaknya untuk membuatkan minum. Kardi kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Dipandanginya wajah Kardi dengan seksama, sepertinya dia mengenali wajah Kardi. Rupanya Darmi pernah mengirim surat dan foto kepada Martini saat Kardi masih kecil.

"Oalahh.. Ini kamu *to, Le*, sudah besar sekarang," gembiranya hati Martini melihat cucunya datang.

"Bagaimana kabar Ibu, *Le*?"

"Ibu sudah meninggal setahun yang lalu. Dia terkena kanker mulut rahim. Kok kakek tidak kelihatan, Nek?"

"Nenek turut belasungkawa ya, *Le*. Kakekmu juga sudah meninggal dua tahun lalu. Sekarang yang di rumah ini cuma nenek dan Narni,

anak perempuan Nenek yang sejak lima tahun lalu suaminya meninggal," sambil memperkenalkan perempuan yang membukakan gerbang tadi.

Minuman buatan Narni pun tiba. Narni juga ikut duduk di kursi yang berhadapan dengan Kardi. Mereka berbincang akrab, saat Martini bercerita tentang kakeknya –kakek dari Kasan Dimejo, Kardi memperhatikannya dengan serius. Mata Martini menatap dinding yang dimana terdapat bingkai foto dua orang laki-laki yang wajahnya mirip. Mereka sama-sama mengenakan pakaian pejuang lengkap dengan topi. Sambil menunjuk foto itu, Martini menjelaskan kalau yang di sebelah kiri adalah kakeknya Kardi, Wiryono Utomo dan sebelah kanan adalah suaminya, Kasan Dimejo. Betapa bahagianya Kardi bisa melihat foto wajah almarhum kakeknya, dipandanginya betul-betul.

"Almarhum dimakamkan di mana, Nek? Saya ingin ziarah ke sana," ungkap Kardi. Martini mengambil nafas dalam, nampak kesedihan dari raut mukanya. Seakan tak kuasa dia menceritakannya pada Kardi, buliran air mulai membasahi wajahnya.

"Kakekmu, Wiryono Utomo, jenazahnya tidak ditemukan. Kala itu serdadu Belanda berhasil menangkap dua orang pejuang yang ada di Blitar, salah satunya kakekmu. Besar kemungkinan dia dibunuh oleh serdadu itu, dan jenazahnya dibuang," kenang Martini yang menceritakannya dengan terbata-bata.

Setelah mendengar itu, Kardi pun menangis, dia tak kuasa membendung air matanya. Betapa bangganya dia pada sosok kakeknya yang tak gentar menghadapi Belanda meskipun nyawa taruhannya. Setelah cukup lama berbincang, Martini menunjukkan kamar yang bisa dia gunakan untuk beristirahat. Kamar yang telah lama tak dipakai, namun tetap terjaga kebersihannya.

Di meja makan telah tersaji makanan lengkap, ada pecel, rawon, dan kerupuk. Nasinya pun masih hangat. Teko besar berisi teh ada di

sampingnya. Martini dan Narni telah menunggu Kardi, saat dia keluar kamar, mereka mengajaknya untuk sarapan.

"Hari ini, kamu mau kemana, Di?" tanya Narni.

"Saya mau ke rumah Pak Kartono, *Bulik*. Kami bertemu di kereta saat menuju ke Mojokerto.

"Kartono? Yang rumahnya di Blitar dan mempunyai anak dan cucu yang tinggal di Mojokerto?" tanya Martini.

"Iya, Nenek kenal dengan dia?"

"Dia teman seperjuangan kakekmu, Wiryono Utomo. Mereka berada dalam satu *brigade*, saat kakekmu tertangkap oleh Belanda, Kartono juga terkena tembakan di bagian perutnya untung dia masih bisa diselamatkan."

"Ini Di, pakai saja motor *Bulik*. Soalnya bus di sini sering telat. Daripada kamu kelamaan nunggu busnya," kata Narni.

Tok.. tok.. tok.. diketuknya pintu rumah yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 9 itu. Dari dalam rumah, seorang gadis cantik membukakan pintu. Rambutnya panjang terurai, parasnya meneduhkan.

"Maaf, mencari siapa ya, Mas?" tanya gadis itu.

"Apa betul ini rumah cucunya Pak Kartono?" Kardi berbalik tanya.

"Iya betul, silakan duduk dulu, Mas. Saya panggilkan kakek sebentar," dengan ramahnya gadis bernama Santi mempersilakan Kardi untuk menunggu. Tak berselang lama, Kartono keluar menemui Kardi. Kardi lantas mencium tangan Kartono.

"Saya ke sini yang pertama untuk silaturahmi, Kek. Sebelum ke sini tadi Nenek Martini menanyakan saya mau pergi ke mana. Saya menjawab mau menemui Kakek Kartono. Rupanya dia mengenal kakek. Kata nenek, Kakek Kartono ini teman seperjuangan almarhum kakek saya, Wiryono Utomo."

"Oh.. jadi kamu itu cucunya Wiryono ya, Nak?" sahut Kartono.

"Iya, Kek. Saya sejak kecil sampai

dewasa tinggal di Berlin. Baru kali ini saya punya kesempatan untuk mencari jejak sang kakek. Almarhum Ibu saya sebelum meninggal, juga menceritakan kalau kakek adalah sosok pejuang yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi nusa bangsa.”

Kartono memejamkan mata mengingat masa perjuangan dia bersama Wiryo. Baginya, Wiryo bukan hanya sekedar sahabat, dia juga sekaligus sebagai guru. Kartono banyak belajar dari Wiryo tentang arti perjuangan dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Meneteslah air mata Kartono saat menceritakan kisah tertangkapnya Wiryo dan jenazahnya tidak ditemukan sambil menunjukkan luka bekas peluru di perutnya pada Kardi.

“Kakek tidak apa-apa?” tanya Kardi yang melihat kesedihan pada diri Kartono.

“Kakek tidak apa-apa, Nak. Kakek teringat akan kakekmu yang begitu hebat,” jawab Kartono. Pada pagi itu juga, Kartono mengajak Kardi ke Surabaya. Dia hendak menunjukkan sesuatu pada Kardi.

Cucu Kartono yang bernama Santi hari itu juga sedang tidak acara, Kartono memintanya untuk mengantarkan mereka berdua ke Surabaya.

“Biar saya saja yang menyetir mobil,” pinta Kardi. Santi pun mengangguk mengiyakan permintaan Kardi.

Sepanjang perjalanan, Kardi disuguhkan pemandangan alam yang indah. Hamparan sawah yang luas dan pohon pinus yang menjulang. Kardi mengajak ngobrol Santi yang duduk di sampingnya, kakek berada di kursi belakang. Pukul 1 siang, mereka tiba di Surabaya, rupanya Kartono hendak mengajak Kardi ke Kantor Arsip Jawa Timur. Setelah memarkirkan kendaraan, mereka masuk ke gedung itu. Gedung yang besar dan tertata rapi serta petugas yang ramah menyambut kedatangan mereka. Sugiyo, petugas kantor itu memberi salam hormat pada

Kartono, Kartono pun membalasnya. Rupanya keduanya sudah saling kenal.

“Ini, Nak Kardi ingin mengetahui tentang peristiwa Agresi Militer II yang terjadi di Blitar. Dia ini cucunya Wiryo Utomo,” Kartono memperkenalkan Kardi kepada Sugiyo.

Setelah buku tamu diisi, Sugiyo mengantarkan mereka masuk ke dalam ruang baca arsip. Perasaan Kardi berkecamuk tak menentu saat kakinya melangkah ke dalam ruangan itu. Bagaimana tidak, ini rangkaian panjang usaha pencarian seorang cucu akan riwayat kakek tercintanya. Awalnya, sulit dia mempercayai bahwa dirinya tidak seperti orang pada umumnya, yang bisa menjumpai kakeknya kapan pun dengan mudah, dan mengenali kakeknya sampai pada persemayaman terakhirnya. Dan sekarang, dengan tekad teguh telah mengantarkannya jauh menapaki jejak yang pernah disinggahi kakeknya.

Kardi tersadar dari kecamuk perasaan yang menderanya, bahwa dia harus menuntaskan pencarian ini, bisa jadi dalam ruangan ini, ada secercah terang informasi tentang kakeknya.

“Tinggal diketik saja kata kuncinya, Pak Kardi. Wiir..yoo.. Uuu...toomo...” tuntun Sugiyo, memecahkan lamunan Kardi. Sekejap, tombol “Enter” pada *keyboard* mengantarkan Kardi menemui sosok kakek yang amat dirindukan itu. Ribuan kilometer, dari Ibukota Jerman sampai ke Kota Pahlawan, Surabaya, ditempuh dengan harapan yang besar, bahwa dia akan menjumpai jejak kakeknya. Ya, hanya jejak, meski tak mungkin bertemu raga dengan kakeknya itu.

Sugiyo, arsiparis Kantor Arsip Jawa Timur yang melayaninya di ruang baca arsip, bercerita panjang lebar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan terutama saat Agresi Militer II yang melibatkan kakeknya. Cerita yang sebagiannya hampir sama didapatinya dari sahabat seperjuangan kakeknya, Kartono. Mengalir begitu saja cerita dari arsiparis ramah itu, mendorong tetesan hangat dari ujung matanya, yang keburu diseka sebelum

jatuh membasahi *keyboard PC* di depannya.

Kardi mengagumi hasil alih media arsip-arsip yang merekam peristiwa agresi bersejarah itu, begitu informatif. Selain arsip konvensional yang dialihmediakan, dia juga bisa melihat foto asli yang sangat terawat. Dipandanginya foto rombongan pejuang dengan latar bangunan tua yang bertuliskan “Blitar”. Orang yang berdiri di barisan depan, nomor lima dari kanan nampaknya dikenal Kardi. Wajah itu sama dengan wajah yang ada di foto yang terpajang di dinding rumah Nenek Martini.

“Iya, itu kakekmu, Wiryo Utomo. Di belakangnya, ada kakek yang memakai kacamata hitam,” kata Kartono sambil menunjuk foto itu. Kardi pun langsung tersenyum. “Betapa gagahnya Wiryo Utomo menggunakan pakaian itu, tubuhnya tinggi besar”, ujar Kardi.

Penjelajahan Kardi di Kantor Arsip Jawa Timur tidak hanya pada arsip-arsip yang memuat jejak perjuangan Sang Kakek, tetapi juga klipings koran yang terbit kala itu. Semua fakta visual itu diamatinya lekat-lekat. Dahaga keingintahuan Kardi tentang kakeknya ternyata belum berhenti sampai di situ. Setelah informasi yang dia dapatkan, dia berniat untuk melakukan penelusuran ke kantor Arsip Nasional Republik Indonesia dan bahkan sampai ke *National Archive of Netherland*.

“Kakek, tak pernah saya bayangkan akan berjumpa denganmu dengan perasaan sekagum ini. Semoga Tuhan mendepak kakek di surga-Nya,” bisik Kardi dalam hati seiring langkah kakinya keluar dari ruang baca arsip. Disalaminya erat Sugiyo, sang arsiparis penjaga sejarah bangsa. “Terima kasih, Pak. Saya bisa membaca jejak sejarah kakek saya karena dedikasi Bapak dan teman-teman menata arsip.” ucap Kardi. Sugiyo membalas dengan anggukan dan senyum yang tulus.

Perjalanan Kardi tidak berhenti. Dia mantap melanjutkan penelusurannya, “Kakek..aku akan mencarimu lagi...”.

KEPALA ANRI : “ARSIPARIS MADYA HARUS TAMPIL”



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan memberikan arahan kepada para arsiparis madya di lingkungan ANRI

Jakarta, ARSIP - (22/1), Peran Arsiparis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memang tengah menjadi perhatian khusus Kepala ANRI, Mustari Irawan. Terkait dengan hal tersebut, Mustari mengadakan tatap muka langsung dengan ketigapuluhdelapan orang Arsiparis Madya di lingkungan ANRI. Acara diselenggarakan di Ruang Serba Guna Soermatini Gedung A Kantor Arsip Nasional RI. Dalam tatap muka tersebut Mustari menyampaikan arahan terkait dengan peran Arsiparis Madya.

Mustari mendukung penuh para Arsiparis Madya untuk dapat maju dan tampil dalam forum nasional maupun internasional. “Saya sangat mendukung para Arsiparis Madya

ini untuk berani tampil baik di forum atau komunitas-komunitas, seminar atau bahkan forum internasional”, ujar Mustari.

Dalam arahannya selain menyatakan dukungan penuhnya kepada para Arsiparis Madya, beliau juga menekankan nilai profesionalisme, bahwa penting bagi seorang Arsiparis Madya untuk memahami *ethic competency*, *social competency* dan *strategic competency*.

Seorang Arsiparis Madya perlu memiliki kompetensi sosial, harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan di mana pun dia berada. Harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh disampaikan terkait dengan informasi, itu yang

dimaksud dengan *ethic competency*. Selanjutnya kompetensi untuk berpikir strategis ke depan. Melahirkan konsep - konsep baru yang visioner untuk ke depan- *strategic competency*,” ujar Mustari.

Menutup arahannya, beliau berpesan agar Arsiparis Madya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada ANRI.

Tatap muka ini disambut hangat oleh para Arsiparis Madya, di mana kesempatan tatap muka ini mereka dapat berbicara langsung kepada Kepala ANRI untuk menyampaikan masukan-masukan, saran dan ide dalam forum diskusi yang ditawarkan langsung oleh Kepala ANRI. (Ann)

INDONESIA JALIN KERJA SAMA DENGAN TIMOR LESTE DI BIDANG KEARSIPAN



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan dan Sekretaris Negara bidang Administrasi Pemerintah Timor Leste, Samuel Mendonca menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) bidang kearsipan (26/1) di Dili. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Rui Maria de Araujo.

Dili, Timor Leste, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan dan Sekretaris Negara bidang Administrasi Pemerintah Timor Leste, Samuel Mendonca menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) bidang kearsipan (26/1) di Dili. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Rui Maria de Araujo.

Adapun ruang lingkup kerja sama bilateral ini antara lain berkenaan dengan pengembangan bidang pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis, publikasi kearsipan dan kunjungan timbal balik para arsiparis atau tenaga ahli bidang kearsipan.

Selain bidang kearsipan ada empat bidang lain yang menjadi muatan kerja sama bilateral Indonesia-Timor Leste, yaitu bidang pemuda dan olahraga, meteorologi, klimatologi dan geofisika,

energi dan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Agenda penandatanganan kerja sama di bidang kearsipan ini juga menjadi salah satu agenda kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo. Adapun sebelumnya, Timor Leste juga menyampaikan maksud kerja sama bidang kearsipan kepada Duta Besar RI untuk Timor Leste. (tk)

KEPALA ANRI SERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA KEARSIPAN KEPADA KOTA SURABAYA

Surabaya, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan menyerahkan sertifikat akreditasi lembaga kearsipan kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya di ruang rapat Wali Kota Surabaya, Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya, Jawa Timur. Sertifikat tersebut diterima oleh Sekertaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan. Hadir dalam acara ini Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih, Kepala Pusat Akreditasi ANRI, Rudi Anton, para asisten Wali Kota, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, dan lurah se-kota Surabaya.

Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya mendapatkan sertifikat akreditasi dengan predikat A (sangat baik). Nilai akreditasi tersebut merupakan yang pertama diperoleh oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Surabaya menyampaikan bahwa banyak manfaat dari akreditasi ini. Pertama kita dapat menelusuri arsip yang tadinya tidak tertata dengan baik yang selama ini tersimpan di seluruh SKPD dan tempat-tempat lainnya. Kedua, kita mendapatkan informasi dari proses digitalisasi yang dilakukan terhadap arsip tersebut, sehingga apabila ada masalah karena arsipnya sudah tersedia dapat diatasi dengan baik. Kami menyampaikan penghargaan kepada ANRI atas upayanya dalam memberikan



Kepala ANRI, Mustari Irawan menyerahkan sertifikat akreditasi lembaga kearsipan kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. Sertifikat tersebut diterima oleh Sekertaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan. Hadir dalam acara penyerahan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih.

penghargaan ini dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh SKPD, camat, lurah dan semua unsur terkait yang telah mendukung kegiatan kearsipan di Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, karena dengan kerja sama yang baik dari seluruh perangkat kota Surabaya maka sertifikat ini bisa diraih.

Sementara itu Mustari menyampaikan apresiasinya kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya yang sudah memperoleh akreditasi dari ANRI. Karena memperoleh akreditasi ini tidak mudah, dibutuhkan keberanian dan usaha yang keras dari semua komponen lembaga kearsipan agar memenuhi standar yang ditentukan dalam sebuah akreditasi lembaga,"

ujar Mustari. Lebih lanjut Mustari Irawan menyampaikan bahwa yang lebih penting adalah mengaplikasikan apa yang menjadi tanggungjawab lembaga setelah mendapat akreditasi ini. Arsip sesungguhnya informasi yang dibutuhkan oleh setiap organisasi. Permasalahannya bagaimana mengubah arsip menjadi sebuah informasi yang dapat disajikan dan dinikmati oleh masyarakat," terang Mustari.

Lebih lanjut Arini mengungkapkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota Surabaya berkat dukungan penuh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Tanpa dukungan dari pimpinan tertinggi niscaya apa yang dilakukan tidak akan berhasil dengan baik.(MI)

KPK SERAHKAN ARSIP STATIS PERKARA KORUPSI KEPADA ANRI



Penyerahan secara simbolis arsip KPK dari Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Kepala ANRI Mustari Irawan

Jakarta, ARSIP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di ruang Auditorium KPK, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta (03/02). Pada kesempatan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kepala ANRI Mustari Irawan menandatangani berita acara penyerahan arsip dan dilanjutkan dengan acara penyerahan arsip secara simbolis.

Dalam laporannya, Plt. Sekretaris Jenderal KPK R. Bimo Gunung Abdul Kadir menyampaikan bahwa penyerahan arsip statis KPK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009

tentang Kearsipan. Lebih lanjut Bimo menginformasikan kepada seluruh undangan yang hadir mengenai arsip KPK yang diserahkan ke ANRI. Arsip KPK yang diserahkan ke ANRI terdiri dari arsip pada Deputy Penindakan yang merupakan berkas perkara yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004 sampai tahun 2009 sebanyak 135 berkas perkara," ujarnya.

Sementara itu, Mustari Irawan sangat mengapresiasi acara penyerahan arsip KPK kepada ANRI dan mengutarakan pentingnya penyerahan arsip KPK. Saya kira arsip ini (arsip statis KPK) sangat penting untuk dapat memberikan gambaran mengenai transparansi yang sudah

dilakukan KPK selama ini. Hal ini nanti bisa diketahui oleh masyarakat, ungkap Mustari. Lebih lanjut Mustari menyampaikan bahwa arsip statis KPK dapat dijadikan proses pembelajaran di masa mendatang mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, Agus Rahardjo menambahkan makna pentingnya penyerahan arsip statis KPK. "Hal ini (arsip statis KPK) bisa untuk pengajaran teman-teman seperti mahasiswa atau siapa pun yang mau mempelajari kasus itu (tindak pidana korupsi)," jelasnya. (sa)

KUNJUNGAN KERJA KEPALA ANRI KE METRO TV: MELAWAN LUPA DENGAN ARSIP

Jakarta, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan, didampingi oleh seluruh Eselon I di lingkungan Arsip Nasional RI melakukan kunjungan kerja ke Metro TV di Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya - Kebon Jeruk. Kunjungan kerja tersebut diterima oleh *Public and Publicity Manager* Metro TV beserta dengan Fifi Aledya Yahya dan tim Metro TV lainnya. Agenda kunjungan kerja, Mustari bertujuan untuk menyinergikan Arsip Nasional RI dengan media penyiaran dalam konteks kearsipan.



Kepala ANRI, Mustari Irawan, didampingi oleh seluruh Eselon I di lingkungan Arsip Nasional RI melakukan kunjungan kerja ke Metro TV. Kunjungan kerja diterima oleh *Public and Publicity Manager* Metro TV beserta dengan Fifi Aledya Yahya dan tim Metro TV .

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan arsip-arsip Gerakan Non Blok (GNB) dan Arsip Tsunami Aceh akan diajukan sebagai Memori Warisan Dunia atau *Memory of The World (MOW)*. Dalam rangka menambah khazanah arsip Tsunami Aceh, Arsip Nasional RI berupaya untuk bekerja sama dengan Metro TV. Metro TV adalah stasiun TV yang pertama kali menyiarkan berita terkait dengan Tsunami Aceh. Tentunya hasil liputan tersebut menghasilkan volume arsip yang banyak tentang Tsunami Aceh. Agar khazanah yang dimiliki oleh bangsa ini menjadi lengkap kiranya Metro TV dari sisi dunia penyiaran dapat bersinergi dengan kami . Sehingga arsip tentang Tsunami Aceh yang ada di Indonesia dapat menjadi memori kolektif bangsa yang utuh .papar Mustari.



Tim ANRI melihat salah satu ruang produksi Metro TV

Masih dalam kesempatan yang sama M. Taufik, Deputy Bidang Konservasi Arsip, menambahkan bentuk kerja sama ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen sebagai anak bangsa untuk mempertahankan ingatan bangsa akan sejarahnya. Dan kami dari sektor *government*

pun berharap Metro TV dapat menggaungkan harta karun yang dimiliki oleh bangsa ini yang tersimpan di ANRI ujar Taufik menutup sambutannya.

Diakhir kesempatan Kepala Arsip Nasional RI memberikan

apresiasi kepada Metro TV yang telah membuat program “ program siaran dengan menggunakan arsip dari ANRI. Dalam apresiasinya disampaikan pula bahwa program tersebut membantu bangsa Indonesia untuk tidak menjadi bangsa yang amnesia. (ann)

KEMENSETNEG RI SERAHKAN ARSIP KTT GNB DAN KTT TSUNAMI KEPADA ANRI

Jakarta, ARSIP - Guna mendukung arsip Gerakan Non Blok (GNB) dan arsip Tsunami sebagai *Memory of the World* (MoW), Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia serahkan arsip kenegaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB ke-10 tahun 1992 dan arsip KTT Tsunami tahun 2005. Penandatanganan serah terima arsip KTT GNB dan KTT Tsunami tersebut dilaksanakan oleh Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan di Gedung Utama Kemensetneg RI, Jakarta (2/11). Adapun keseluruhan arsip yang diserahkan berjumlah 148 berkas atau 181 box.

Pada kesempatan itu, Pratikno menyampaikan pentingnya kedua konteks arsip tersebut sebagai proses pembelajaran di masa mendatang. "Pertama dari sisi substansi arsipnya, jadi Gerakan Non Blok di Indonesia itu mencerminkan kepemimpinan Indonesia di masyarakat internasional. Ini peran penting Indonesia untuk mencapai perdamaian dunia dan politik yang adil", ujarnya.

Pratikno juga menyampaikan perihal yang sama pentingnya arsip



Serah terima arsip KTT GNB dan KTT Tsunami oleh Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan di Gedung Utama Kemensetneg RI, Jakarta (2/11).



Suasana penyerahan arsip KTT GNB dan KTT Tsunami

tsunami sebagai pembelajaran yang luar biasa mengenai kecepatan penanganan bencana, makna solidaritas kepada umat manusia di seluruh dunia, dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Rektor Universitas Gajah Mada periode 2012-2014 ini juga berharap arsip GNB dan

arsip Tsunami ini dapat dikemas dalam bentuk karya-karya ilmiah, buku-buku ajar bahkan karya-karya sinematek sehingga dapat dijadikan media pembelajaran masyarakat internasional.

Dalam sambutan, Mustari sangat mengapresiasi kegiatan penyerahan arsip KTT GNB dan arsip Tsunami yang diserahkan langsung oleh Mensesneg RI Pratikno. "Saya kira itu (Penyerahan arsip oleh Mensesneg RI), adalah suatu bukti yang besar dari Pak Menteri atas kepeduliannya terhadap arsip", jelasnya. (sa)

BENTUK “TIM SUKSES REFORMASI BIROKRASI”, ANRI SIAP BERKOMITMEN TINGKATKAN KINERJA PROGRAM RB

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membentuk Tim Sukses Reformasi Birokrasi di lingkungan ANRI yang terdiri dari Tim RB, *Role Model*, dan Agen Perubahan. Pembentukan tim tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja implementasi program RB di lingkungan ANRI. Kepala ANRI Mustari Irawan dalam arahannya menyampaikan bahwa pembentukan tim Reformasi Birokrasi di ANRI bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi di ANRI (15/2). Mustari mengajak kepada seluruh pegawai untuk memberikan *outcome* bukan hanya *output* agar program kerja RB mampu berjalan sesuai tujuan organisasi. “Saya berharap seluruh pegawai harus juga memberikan kontribusinya kepada organisasi”, ungkapnya.

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Rini Agustiani dalam laporannya menyampaikan bahwa Pada pertengahan tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian pelaksanaan RB di ANRI. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tingkat capaian pelaksanaan RB di ANRI dinilai sebesar 56,93 %. Hal ini berarti dalam kurun waktu 3 tahun (2011 – 2013) hanya terjadi kenaikan nilai RB sebesar 3,93 % dari hasil penilaian RB tahun 2011 sebesar 53 %. Kalau dihitung pertahun maka kenaikan nilai RB per tahun mulai tahun 2011 – 2013 sebesar 1,31 %. Hal ini menjadi pengingat bagi Tim RB ANRI sehingga di sisa tahun 2014, Tim RB bekerja keras untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan RB yang belum tuntas sesuai dengan rekomendasi Menpan.

Pada awal tahun 2015, Kementerian PAN dan RB kembali melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan RB di lingkungan ANRI. Hal ini terkait dengan surat ANRI tentang usulan kenaikan besaran



Tim Sukses Reformasi Birokrasi di lingkungan ANRI yang terdiri dari Tim RB, *Role Model*, dan Agen Perubahan

Tunjangan Kinerja. Setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2015, tingkat capaian pelaksanaan RB di ANRI sampai dengan tahun 2014 dinilai sebesar 68,48 %. Hal ini berarti, terjadi kenaikan sebesar 11,55 % dari hasil evaluasi RB tahun 2014. ANRI menargetkan nilai capaian RB pada tahun 2019 menjadi 100 % dengan melaksanakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain :

Pertama, perlu upaya menggerakkan organisasi untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja keseluruhan unit kerja, melalui optimalisasi pemberdayaan agen-agen perubahan yang telah dibentuk. Kedua, perlu dilakukan analisis kebijakan untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan ANRI yang berorientasi kepada pelanggan, serta menerapkan SOP secara konsisten untuk penyusunan peraturan perUUan ke depannya.

Ketiga, peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah

dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi. Namun belum seluruhnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyempurnaan *business process*-nya. Keempat, hasil penilaian kinerja individu hendaknya dijadikan dasar bagi penetapan pemberian tunjangan kinerja, pengembangan karir individu, dan pemberian reward.

Kelima, segera membangun sistem pengukuran kinerja yang dirancang dengan basis elektronik, implementatif, dan terintegrasi dengan sistem-sistem yang lainnya. Keenam, menindaklanjuti pembangunan Zona Integritas dan segera mengusulkan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dan Terakhir, mengimplementasikan sistem sanksi/reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dalam meningkatkan budaya pelayanan prima. (sa)

BINCANG-BINCANG KEARSIPAN BERSAMA DR. BAMBANG WIDJOJANTO, SH, MH.

“ARSIP SEBAGAI BAHAN BUKTI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI”

Jakarta, ARSIP - Ikatan Arsiparis ANRI (IAA) bekerja sama dengan Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan Bincang-Bincang Kearsipan dengan tema “Arsip sebagai Bahan Bukti dalam Pemberantasan Korupsi” di Ruang Noerhadi Magetsari Gedung C lantai 2, ANRI Jalan Ampera Raya Jakarta (23/02). Panitia IAA menghadirkan nara sumber mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Bambang Widjojanto, SH, MH. Kegiatan IAA ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi arsiparis dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya guna berperan aktif dalam mencegah terjadinya korupsi.

Pada kesempatan itu, Bambang Widjojanto (BW) menjelaskan, ada pemahaman yang salah pada sebagian besar masyarakat tentang arsip. “Sebenarnya arsip itu gue banget, bahwa arsip itu seharusnya menjadi pusat informasi, arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan negara”, ujarnya. BW menambahkan bahwa pembuktian kasus dapat dibuktikan secara transparan dan menyeluruh karena peristiwa dan fakta yang diduga sebagai tindak pidana tersampaikan secara baik. BW juga berharap agar ANRI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi *Centre*



Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Bambang Widjojanto, SH, MH menjadi pembicara seminar yang diselenggarakan Ikatan Arsiparis ANRI dengan tema “Arsip sebagai Bahan Bukti dalam Pemberantasan Korupsi”



Suasana seminar

of Excellence & pusat pembelajaran demokratisasi dan pemberantasan korupsi.

Kepala ANRI Mustari Irawan dalam sambutannya menyampaikan tentang peran IAA dalam memajukan arsiparis, bergerak dan bekerja

dalam memajukan Indonesia.”Kegiatan ini diharapkan mampu mencerahkan para arsiparis, mengoptimalkan potensi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan”, ungkap Mustari.

Pada kegiatan ini diagendakan pula launching buku IAA dengan judul “Catatan Arsiparis: Rumah Ingatan Kearsipan Indonesia” dan peluncuran website resmi IAA dengan alamat www.iaa.or.id. (DS)

RAPAT KOORDINASI PENYELAMATAN ARSIP

PENYIARAN: ARSIP MEDIA MASSA SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA DAN MEMORI DUNIA



Duta Arsip, Rieke Dyah Pitaloka saat memberikan sambutan pada acara Rakor Penyelamatan Arsip Penyiaran

Jakarta, ARSIP - Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Penyiaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuisisi Arsip Nasional RI resmi dibuka oleh Kepala Arsip Nasional RI, Mustari Irawan. Dengan mengangkat tema "Arsip Media Massa sebagai Memori Kolektif Bangsa dan Memori Dunia". Rakor yang bertujuan untuk menyelamatkan arsip-arsip yang dihasilkan media massa dihadiri oleh insan penyiaran ini mendapat sambutan hangat. Bertempat di ruang Bina Karna, Bidakara Hotel Jakarta Rakor Penyelamatan Arsip Penyiaran turut dihadiri pula oleh Duta Arsip, Rieke Dyah Pitaloka.

Dalam sambutannya Mustari

Irawan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini. Selain itu Mustari juga menghimbau kepada para insan penyiaran untuk dapat menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional RI agar dapat menjadi memori kolektif bangsa.

Senada dengan Kepala Arsip Nasional RI, Duta Arsip juga menghimbau agar media penyiaran turut mengambil peran dalam penggoresan sejarah bangsa. Karena arsip tidak hanya sebuah rekaman namun melalui arsip, kita dapat mengetahui peradaban sebuah bangsa. Masih dalam kesempatan yang sama, Duta Arsip menyampaikan melihat arsip sebagai sebuah peradaban maka

saat ini Duta Arsip juga berjuang agar Arsip Nasional RI yang saat ini berada di Komisi II DPR RI dapat dialihkan ke Komisi X seperti halnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Acara Rakor berlangsung dengan 2 (dua) sesi dengan menghadirkan Direktur Utama LPPRRI dan Prof.Dr.Ir. Jan Sopalehuwakan, Profesor Peneliti dari LIPI sebagai narasumber.

Rapat Koordinasi menghasilkan rekomendasi yang salah satunya menyebutkan bahwa media massa wajib menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional RI. (Ann)

HARI JADI KOTA PEKALONGAN KE-110, ANRI BERIKAN “KADO SPESIAL”



Penyerahan Naskah Sumber Citra Kota Pekalongan dalam Arsip oleh Kepala ANRI Mustari Irawan kepada Wakil Walikota Pekalongan Saelani Mahfudz dan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pekalongan Maryati

Pekalongan, ARSIP - Merayakan Hari Jadi Kota Pekalongan Ke-110, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan “kado spesial” kepada Pemerintah Kota Pekalongan berupa naskah sumber Citra Kota Pekalongan dalam Arsip. Naskah sumber tersebut diserahkan oleh Kepala ANRI Mustari Irawan kepada Wakil Walikota Pekalongan Saelani Mahfudz dan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pekalongan Maryati. Acara penyerahan naskah sumber dilaksanakan di GOR Jetayu, Pekalongan (12/04)

Dalam sambutan, Kepala ANRI



Wakil Walikota Pekalongan Saelani Mahfudz saat mengunjungi pameran Citra Kota Pekalongan dalam Arsip

menyampaikan bahwa dengan adanya naskah sumber Kota Pekalongan dalam Arsip dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran mengenai sejarah kota Pekalongan.

Saelani sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada ANRI yang telah membuat naskah sumber tersebut.

Setelah acara penyerahan naskah sumber, Mustari dan Saelani beserta jajaran mengunjungi pameran arsip Kota Pekalongan di dalam gedung GOR Jetayu.

Pada kesempatan ini, Kepala ANRI juga menyampaikan kesediaannya untuk siap membantu KPAD Kota Pekalongan yang akan mempersiapkan pembangunan depo arsip. (sa)

RAPAT DEWAN EKSEKUTIF INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES



Suasana Rapat Dewan Eksekutif ICA

Paris, ARSIP - Rapat Dewan Eksekutif (*Executive Board*) *International Council on Archives* (ICA) pada tanggal 21–22 April 2016 dilaksanakan di Kantor Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Perancis, 182 rue Saint-Honoré – 75001 Paris – Salle André Malraux. Presiden ICA Mr David FRICKER, yang juga Kepala Arsip Nasional Australia, membuka dan memimpin rapat selama dua hari didampingi oleh Wakil Presiden ICA Mr Henri ZUBER dan Sekretaris Jenderal ICA Mr David LEITCH. Rapat dihadiri oleh sekitar 36 orang peserta, termasuk Dr. Mustari IRAWAN, MPA sebagai Ketua SARBICA.

Dewan Eksekutif ICA dalam rapat tersebut membahas beberapa agenda diantaranya tentang hak

cipta dan kekayaan intelektual, peran dan partisipasi ICA dalam *Open Government Partnership*, reviu cabang-cabang ICA di 13 regional, serta persiapan kongres ICA di Seoul-Korea pada bulan September 2016.

Dalam kesempatan ini, Kepala ANRI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Kepala Arsip Nasional Australia (NAA) guna membahas perkembangan kerja sama kedua lembaga di tahun 2014–2015 dan rencana pelaksanaan kegiatan kerja sama pada tahun 2016–2017. Di sela-sela pembahasan, Kepala ANRI menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala NAA atas berdirinya gedung preservasi dan penyimpanan arsip NAA yang baru dengan fasilitas modern. Dengan

gembira Kepala NAA menjelaskan tentang gedung baru tersebut, yang rencananya akan diresmikan pada tanggal 9 Juni 2016 bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Kearsipan Internasional. Kepala NAA sekaligus secara resmi mengundang Kepala ANRI untuk menghadiri acara peresmiannya.

Kepala ANRI didampingi oleh Kepala Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Desi PRATIWI), sementara Kepala NAA didampingi oleh Director of International and Strategic Liaison (Mrs Helen WALKER). Pertemuan yang berlangsung hangat ini dilakukan di Café Jardin du Paris Royal, 6 rue de Montpensier, 75001 Paris, Perancis. (DAP)

INDONESIA-ALJAZAIR TANDATANGANI FORMULIR JOINT NOMINATION PENGGAJUAN ARSIP GNB SEBAGAI MOW



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (kiri) Mustari Irawan dan Kepala Arsip Nasional Aljazair (kanan) Abdelmadjid Chikhi tandatangani formulir *joint nomination* arsip Gerakan Non Blok (GNB) sebagai *Memory of the World* (MoW)

Aljazair, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan dan Kepala Arsip Nasional Aljazair Abdelmadjid Chikhi menandatangani formulir *joint nomination* arsip Gerakan Non Blok (GNB) sebagai *Memory of the World* (MoW) – UNESCO. Acara penandatanganan dilaksanakan di Arsip Nasional Aljazair, Algiers (23-26/04).

Pada kesempatan itu dilaksanakan pula pertemuan bilateral antara delegasi ANRI, KBRI, dan delegasi Aljazair. Pertemuan membahas mengenai empat hal. Pertama, peningkatan implementasi kerja sama kearsipan antara ANRI dengan Arsip Nasional Aljazair. Kedua, tukar-menukar informasi dan arsip GNB. Ketiga, nominasi bersama arsip GNB sebagai MoW. Keempat, pembentukan

pusat studi dan dokumentasi arsip GNB untuk menghidupkan semangat negara-negara penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB.

Pertemuan kedua negara menghasilkan antara lain formulir nominasi MoW UNESCO yang sudah ditandatangani oleh dua negara, daftar arsip GNB, publikasi kegiatan dan dokumentasi kegiatan. (IG/IS)

PRESIDEN SERBIA TOMISLAV NIKOLIĆ KUNJUNGI GEDUNG ARSIP NASIONAL RI



Presiden Tomislav Nikolić didampingi Kepala ANRI Mustari Irawan mengunjungi pameran arsip diplomatik Indonesia-Serbia

Jakarta, ARSIP - Presiden Serbia Tomislav Nikolić mengunjungi Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Gajah Mada Nomor 111, Jakarta Barat (28/04). Kunjungan Presiden Tomislav Nikolić diterima langsung oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan beserta jajarannya.

Pada kesempatan itu, Presiden Serbia Tomislav Nikolić, dan Kepala ANRI Mustari Irawan beserta



Presiden Serbia Tomislav Nikolić (kiri) dan Kepala ANRI Mustari Irawan (kanan)

jajarannya melaksanakan pertemuan tertutup. Setelah pertemuan, Presiden Tomislav Nikolić, didampingi Kepala ANRI Mustari Irawan mengunjungi pameran arsip diplomatik Indonesia-

Serbia. Pada masa lampau, Kedua negara memiliki ikatan sejarah yang kuat dan peranan yang sangat strategis didalam pembentukan Gerakan Non Blok. (DS/SA)